MODEL PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012-2016

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Raras Kinanthi

NIM : 14313213

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

MODEL PENDAPATAN ASLI DAERAH

KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2012-2016

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Raras Kinanthi

NIM : 14313213

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dia tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universtas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2017



Raras Kinanthi

PENGESAHAN

MODEL PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2012-2016

Nama : Raras Kinanthi

NIM : 14313213

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Desember 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

MODEL PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016

Disusun Oleh : **RARAS KINANTHI**

Nomor Mahasiswa : **14313213**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 5 Januari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D. .....

Penguji : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma bakṭiku

Kepada Ayah dan Ibu tercinta,

Terimakasih atas segala cinta dan kasih,

Kepercayaan dan kesabaran serta doa yang tulus.

Kupersembahkan karya ini kepada seluruh orang yang sudah hadir dalam hidupku yang telah memberikan semangat dihidupku.

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah : 5-6)

“ Diwajibakan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai seuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al Baqarah 2:216)

“ Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit.“

(Imam Ali Ibn Abi Thalib AS)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulilah, puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat rahmat serta hidayah-Nya dengan memberikan kelancaran dan kesabaran sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "MODEL PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016". Shalawat serta salam senantiasa tercurahka kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju zaman kecerdasan dan kebenaran.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. **Allah SWT** yang telah mengijinkan skripsi ini terselesaikan.
2. **Keluarga**, orang tua dan kakak, Sartiono dan Susi Rochayani serta kakak Rian Rosartio dan Ayu Lestari yang selalu memberikan dukungan moral dan selalu mendoakan.

3. **Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D**, selaku rektor Universitas Islam Indonesia
4. **Bapak Dwipraptono Agus Harjito, Dr.,M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonmi Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D.** selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
6. **Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.** , selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan pengarahan dan dorongan serta motivasi dengan kesabaran dalam pengerjaan skripsi selama ini.
7. **Seluruh Dosen dan Staff Karyawan UII Yogyakarta** yang telah mewariskan ilmunya kepada kami dengan tulus.
8. **Nasrullah Arsyad Safin,** yang telah mendukung dan menemani penulis.
9. **Sahabat-sahabat Arga, Galuh, Lilo, Listya, Dilla, Yulian, Haikal dan Resa** terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
10. **Sahabat penulis Melis dan Dhifa,** yang selalu menemani dan memberi dukungan selama di Jogja.
11. **Sahabat-sahabat penulis Hesti, Yovinda, Nila, Hida, Firdaus, Derian, Diar, Billy, Hanif, Alfin, Hanif, Wisnu dan Rully** yang namanya tidak bisa disebutkan satu-satu disini. Teman-teman yang sudah menjadi keluarga baru tempat berbagi suka duka.

12. **Teman –teman Jurusan Ilmu Ekonomi,** khusunya angkatan 2014 yang sama-sama berjuang menuntut ilmu, semoga mendapatkan kesuksesaan masing-masing. Aamiin.
13. Semua pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Terimakasih semuanya.

Wassala'mualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Desember 2017

Raras Kinanthi

DAFTAR ISI

Halaman Judul……i

Halaman Plagiarisme…….ii

Halaman Pengesahan……iii

Halaman Berita Acara Ujian Skripsi……iv

Halaman Persembahan……...v

Halaman Motto…….vi

Kata Pengantar…….vii

Halamann Daftar Isi……...x

Halaman Daftar Tabel dan Gambar……xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang……11

1.2. Rumusan Masalah……..11

1.3. Tujuan Penelitan…….11

1.4. Manfaat Peneleitian…..……...12

1.5. Sistematika Penelitian…...…….12

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka…….14

2.2 Landasan Teori ……...25

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah……...25

2.2.2. PDRB Perkapita……...32

2.2.3. Jumlah Penduduk…….34

2.2.4. Pengeluaran Pemerintah……..35

2.2.5. Inflasi…….....37
2.2.6. Hubungan PDRB perkapita dengan PAD……37
2.2.7. Hubungan Jumlah Penduduk dengan PAD……..38
2.2.8. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PAD……...40
2.2.9. Hubungan Inflasi dengan PAD……42
2.3 Kerangka Pemikiran……44
2.4 Hipotesa Penelitian……..46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data…….47
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional……..47
3.3 Metode Analisis yang Digunakan……....49
3.3.1. Common Effect Models……...51
3.3.2. Fixed Effect Models……52
3.3.3. Random Effect Models……....53
3.3.4. Pengujian Pemilihan Model…….54
3.3.5. Uji Statistik……..56
3.3.5.1. Uji Determinasi (R2)……...56
3.3.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)……..56
3.3.5.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)……57

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian……59
4.2 Deskripsi Objek Penelitian……..59
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)……...59
4.2.2. PDRB Perkapita……...62
4.2.3. Jumlah Penduduk…….64
4.2.4. Pengeluaran Pemerintah……..66
4.2.5. Inflasi……...67

4.3 Pemilihan Model Regresi
4.3.1. Pengujian Menggunakan Common Effect Models……..70
4.3.2. Pengujian Menggunakan Fixed Effect Models……71
4.3.3. Pengujian Menggunakan Random Effect Models……...73
4.3.4. Pemilihan Model Regresi……76
4.3.4.1. Uji F……76
4.3.4.2. Uji Hausman……77
4.4 Evaluasi Regresi Fixed Effect Models……78
4.4.1. Uji Kebaikan Garis Regresi (R-squared)……78
4.4.2. Uji Kelayakan Model……...80
4.4.3. Uji Signifikansi Variabel Independen (uji t)……...81
4.4.4. Analisis Perprovinsi……84
4.5 Analisis Ekonomi
4.5.1. Analisis Pengaruh PDRBperkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)……..85
4.5.2. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)……..87
4.5.3. Analisis Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)……..88
4.5.4. Analisis Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)……...90

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan……..92
5.2 Implikasi……..94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Tengah…….4

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah…….5

Tabel 1.3 PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah ……...7

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah……..7

Tabel 1.5 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah……8

Tabel 1.6 Inflasi Provinsi Jawa Tengah…….9

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu……14

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah……...60

Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah…….62

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah…….64

Tabel 4.4 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah……..66

Tabel 4.5 Inflasi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah……...68

Tabel 4.6 Hasil Regresi *Common Effect Models* ……70

Tabel 4.7 Hasil Regresi *Fixed Effect Models* …….71

Tabel 4.8 Hasil Regresi *Random Effect Models* …….74

Tabel 4.9 Hasil Uji F……...76

Tabel 4.10 Hasil *Uji Haussman* ……..77

Tabel 4.11 Hasil Regresi *Fixed Effect Models* ……...79

Tabel 4.12 *Crosseffect Fixed Effect Model*……..84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Keerangka Penelitian……...44

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) khususnya mengetahui besarnya pengaruh faktor PDRB perkapita, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dengan periode pengamatan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yang dilakukan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel model fixed effect.

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : Pendapatan asli daerah, PDRB perkapita, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 1 tentang penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Pemerintah pusat sudah tidak ikut campur dalam mengatur pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah yang memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Untuk mendukung terselenggarannya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
d. Dana Bagi Hasil (DBH)
e. Pinjaman Daerah dll

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah adalah dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan semakin banyak kebutuhan suatu daerah dapat di biayai oleh Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah akan menunjukan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Menurut Mahmudi (2008:18), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin Tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah.

Kemampuan administrasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan, alokasi tanggung jawab untuk melaksanakan pengenaan pajak dan pungutan pajak tergantung pendapatan asli daerah, tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga ditingkat daerah. Tenaga terampil mungkin terbatas dan sulit bagi pemerintah daerah mempekerjakannya, meskipun ada alternatif seperti menyewa konsultan atau bantuan tenagga dari suatu instansi (Irsyad, 2000:10).

Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat bermacam-macam. Ada beberapa daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi dan terdapat daerah yang memiliki keuangan daerah yang minim. Penelitian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap APBD pemerintah provinsi se Indonesia tahun 2001 dan 2002 menunjukan hanya 7 (tujuh) provinsi yang memiliki kemampuan daerah yang tinggi dan kontribusi pendapatan asli daerah yang tinggi, provinsi tersebut adalah : Bali, Banten, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimatan Barat dan Sulawesi Selatan. Provinsi yang masuk dalam kuadran 2 yaitu yang memiliki kontribusi PAD yang tinggi namun pertumbuhannya rendah meliputi : Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Riau dan Sulawesi Tengah. Provinsi yang masuk dalam kuadran 3 yaitu memiliki kinerja pertumbuhan PAD tinggi

namun kontribusi PAD terhadap pendapatan total rendah terdiri dari : Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Jambi, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Provinsi yang masuk dalam kuadran 3 yaitu memiliki kinerja pertumbuhan PAD rendah dan kontribusi PAD terhadap pendapatan total juga rendah yaitu terdiri dari : Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Papua dan Sulawesi Utara. (Maryono,2009).

Soleh dan Rochmansjah (2010), menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi PAD masih relative kecil. Adanya Dana Perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) ini ternyata justru menjadi ketergantungan.

Tabel 1.1.

Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016

o.	Tahun	DAU (Dalam Rupiah)
	2012	1.516.892.951.000
	2013	1.670.859.369.000
	2014	1.803.931.189.000
	2015	1.629.429.283.000
	2016	1.859.907.223.000

Sumber: BPS data yang diolah

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa transfer dari pemerintah berupa Dana Alokasi Umum dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012

sampai tahun 2014, ditahun 2015 mengalami penurunan tapi ditahun 2016 mengalami peningkatan kembali. Hal ini berarti bahwa kemandirian keuangan Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah masih belum mencukupi kebutuhan fiskal daerah.

Transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut, bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataanya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten, dengan ibu Kota yaitu Kota Semarang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah mengalami trend peningkatan dari tahun ke 2010 sampai 2016. Berikut ini adalah Data mengenai PAD di Jawa Tengah.

Tabel 1.2.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016

No.	Tahun	PAD (Dalam Ribuan Rupiah)
1	2012	5.590.597.156
2	2013	6.716.170.095
3	2014	8.213.117.978
4	2015	9.090.677.397
5	2016	9.672.518.189

Sumber: BPS yang diolah

Tabel diatas menunjukan perkembangan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah dari tahun 2010-2016. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah mengalami peningkatan, hal ini dapat

terjadi karena perekonomian di Ibu Kota Jawa Tengah yaitu Kota Semarang mengalami pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat 2 tahun ke belakang. Bahkan kota Semarang menjadi penyangga utama laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Dalam keterangan tertulis dari Pemkot Semarang, Kota Semarang dengan Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 dan pada tahun 2016 menjadi 5,80. Walaupun setiap tahunnya PAD di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun setiap tahun ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya menuju kemandirian suatu daerah dapat dibuktikan dengan terus meningkatnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat yang tercermin dari perolehan DAU yang terus meningkat di setiap tahunnya.

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal melalui Dana Bagi Hasil Pajak dengan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lainnya dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah.

Iin dan Eni (2009) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh PDRB perkapita, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pembangunan dan Inflasi. Salah satu yang mempengaruhi adalah PDRB perkapita, PDRB perkapita adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi dalam seluruh perekonomian daerah. Dalam hal ini berarti peningkatan PDRB perkapita mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produktivitas tersebut. Didalam keterkaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB perkapita secara positif mempengaruhi PAD, yakni apabila pendapatan suatu penduduk meningkat maka tingkat konsumsi penduduk akan barang dan

jasa juga akan meningkat yang akan mempengaruhi PAD kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3.

PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016

o.	Tahun	PDRB Perkapita (Dalam Juta Rupiah)
	2012	20950.61
	2013	21844.89
	2014	22819.13
	2015	23887.38
	2016	24967.85

Sumber: Data BPS yang diolah

Dapat dilihat dari Tabel 1.3 bahwa PDRB perkapita dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa PDRB perkapita yang meningkat akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.4.

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016

o.	Tahun	Jumlah Penduduk (Dalam Jiwa)

	2012	32998700000
	2013	33264300000
	2014	33522700000
	2015	33774100000
	2016	34019100000

Sumber: Data BPS yang diolah

Tabel 1.4 merupakan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami tren yang positif, yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh kalangan para pekerja dan imigran yang menetap tinggal atau hanya sementara di Provinsi Jawa Tengah.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukam agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan penggunaank skala ekonomi didalam produksi, penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan merupakan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan di suatu negara atau di suatu daerah dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik juga akan meningkat (Santoso,2005).

Tabel 1.5.

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Dalam Rupiah)
1	2012	11.446.844.105.134
2	2013	12.724.776.308.434

3	2014	15.086.065.034.422
4	2015	17.820.760.495.342
5	2016	19.354.374.825.983

Sumber : Data BPS yang diolah

Tabel 1.5 menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan sesuai dengan kebutuhan fiskal. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD mampu menutup angaran daerah yang bersangkutan. Disamping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal, 1986). Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katasilator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksanaanya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD akan meningkat.

Tabel 1.6

Inflasi Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016

No.	Tahun	INFLASI (dalam persen)
1	2012	4.24
2	2013	7.99

3	2014	8.22
4	2015	2.73
5	2016	2.36

Sumber : Data BPS yang di Olah

Tabel 1.6 menunjukan bahwa Inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Dari tabel dijelaskan bahwa inflasi di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan. Inflasi ini bersifat fluktuatif karena terjadina naik turun. Namun dari tahun 2012-2016 inflasi terbesar di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 8.22% namun mengalami penurunan drastis ke tahun 2015 menjadi 2.73%.

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2004). Tetapi dengan adanya inflasi maka upah dan gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktifitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk setiap tahun, yang mengakibatkan pendapatan pengusaha lebih besar dan akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil. Dalam hal ini pemerintah mengenakan pajak untuk memberikan potensi penerimaan daerah lebih banyak.

Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti PDRB perkapita, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian yang berjudul **"Model Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 ".**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
5.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis Pengeluaran Pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini memberikan deskripsi perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan diskripsi tersebut dapat dipakai untuk dasar evaluasi pelaksanaan program itensifikasi yang eks ifikansinya yang memberikan manfaat pada penerimaan pendapatan asli daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar penelitian tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar teoritis penelitian, pengertian tentang pendapatan asli daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, penelitian terdahulu dan uraian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraiakan tentang variabel penelitian dan operasional vaiabel, jenis, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian. Analisis data yang menitik beratkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan, dalam bab ini juga akan diuraikan interpertasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang memuat simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk melakukan penelitian terdahulu perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian ini, untuk iu pada bagian ini akan diberikan beberapa penlitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

Beberapa penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah diberbagai daerah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	peneliti	tahun	Judul	variabel	Hasil penelitian
1	Eni dan Iin	2009	Pengaruh variable Makro terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang	PDRB Jumlah Penduduk Inflasi	Variabel Makro (PDRB, Jumlah Penduduk) berpengaruh signifikan terhadap PAD. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD di Kota Semarang.
2	Yeni dan Taufik	2012	Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta terhadap realisasi PAD pada Kota/kab di Provinsi Jawa Timur	PDRB Jumlah penduduk Investasi Swasta	Semua variabel (PDRB, jumlah penduduk, investasi swasta) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD
3	Iwan dan Ghozali	2012	Analisis pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi terhadap PAD Studi Kasus di Kota Malang tahun 1998-2012	PDRB Jumlah penduduk Inflasi	Semua variabel PDRB, jumlah penduduk dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Malang
4	Santoso dan Rahayu	2005	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri	PDRB Jumlah penduduk Pengeluaran pembangunan	Variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD
5	Triani dan Kuntari	2010	Pengaruh variabel makro terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Karanganyar	PDRB Jumlah penduduk inflasi	PDRB berpengaruh negative terhadap PAD Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD Inflasi berpengaruh negative terhadap PAD
6	Himawan Eka satria	2009	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di jawa tengah tahun 1981 - 2006	Investasi PDRB Pendapatan perkapita Inflasi Pengeluaran Pemerintah	Dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel investasi da pengeluaran pemerintahberpengaruh signifikan terhadap PAD
7	Arief eka atmaja dan Drs., R. Mulyo hendarto., MSP	2011	Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2000-2010	PDRB Pengeluaran Pemerintah Jumlah Penduduk	Variabel PDRB, Jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan PAD di Kota Semarang
8	Hibzon	2007	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Sumatera Selatan.	Jumlah penduduk Pertumbuhan ekonomi Pendapatan perkapita	Semua variabel bersama-sama mempengaruhi PAD di Sumatera Selatan.
9	Esti Purwaningsih	2011	Analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah	Pendapatan perkapita Jumlah	Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan

			di Kabupaten sragen taun 1991-2008	perusahaan Jumlah penduduk	terhadap PAD Variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap PAD, Variabel jumlah penduduk berpengaruh negative dan signifikan terhadap PAD.
10	Asmara	2002	Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah pmerintah daerah Sukoharjo tahun 1983-2000	PDRB dan Jumlah Penduduk	Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD.
11	Dwi Haryanto	2009	Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 1998-2007	Jumlah penduduk PDRB Jumlah pasar Jumlah penghuni hotel Jumlah wisatawan	Semua variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan untuk jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.
12	Yugaro May Arisandhe	2012	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati tahun 1992-2007	PDRB Penerimaan Pemerintahan Jumlah penduduk Pengeluaran pemerintah	Dalam jangka pendek variabel PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pemerintah dan pedapatan asli daerah tahun sebelumnya berpengaruh terhadap PAD. Dalam jangka panjang variabel jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintahberpengaruh positif terhadap PAD.
13	Rusera Ricko Yunanto	2016	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten tahun 1990-2012.	PDRB Jumlah penduduk Investasi Pengeluaran pemerintah	Variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD. (PAM)
14	Kurnia Erwandi	2006	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Boyolali tahun 1990-2004	PDRB per kapita Tingkat employment Investasi Pengeluaran pembangunan	Berdasarkan hasil estimasi regresi ECM menghasilkan model yang tidak valid untuk menjelaskan fenomena pengaruh PDRB, tingkat employment, investasi dan pengeluaran pembangunan terhadap PAD di Boyolali baik dalam jangka pendek dan panjang. Variabel bebas dan tidak bebas tidak relevan sehingga hasil estimasinya tidak signifikan.
15	Harry A.P.	2013	Pengaruh Pengeluaran	Pengeluaran	Pengeluaran pemerintah

	Sitaniapessy		pemerintah terhadap PDRB dan PAD	pemerintah sector pertanian Pengeluaran pemerintah sector perikanan dan kelautan Pengeluaran pemerintah sector perindustrian dan perdagangan. PDRB	sector pertanian, Pengeluaran pemerintah sector perikanan dan kelautan, dan Pengeluaran pemerintah sector perindustrian dan perdagangan berpengaruh terhadap PDRB. Dan PDRB berpengaruh terhadap PAD.
16	Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A.A Bagus Putu Widanta	2014	Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Denpansar.	PDRB Jumlah Penduduk Jumlah Wisatawan	Semua variabel secara serempak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Despansar.
17	M. Khairur Rozikin	2012	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah hotel	Variabel jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Lombok.
18	Sugiarti	2008	Variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten magelang tahun 1990-2005	PDRB Jumlah Penduduk Jumlah produksi tanaman bahan makanan utama	PDRB,Jumlah Penduduk, dan Jumlah produksi tanaman bahan makanan utama berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Magelang.
19	Datu	2012	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah di Makassar tahun 1999-2009	Pengeluaran pemerintah PDRB	Pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Makassar pada tahun 1999-2009.
20	Atmaja	2011	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah di kota Semarang	PDRB Pengeluaran Pemerintah Jumlah penduduk	PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Semarang.
21	Evi Adriani dan Sri Indah Handayani	2008	Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin	PDRB Jumlah Penduduk	PDRB berpengaruh signifikan dan dan positif terhadap PAD sedangka jumlah penduduk berpengaruh negative dan tida signifikan terhadap PAD di Kabupaten Merangin.
22	Agus Prabawa	2009	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas	Hasil pajak daerah Hasil retribusi daerah Hasil pengusahaan daerah Hasil pengelolaan milik daerah	Semua variabel secara parsial memberikan pengaruh yang sangat signifikan postif terhadap PAD di Kab Banyumas.
23	Yuliana Erna Florentina	2013	Faktor-faktor yang mempengaruhi	PDRB Investasi	Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh

			Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat tahun 1995-2010	Pengeluaran Pemerintah	positif dan signifikan terhadap PAD. Variabel investasi dan PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.
24	Miragustia Mayza, Raja Masbar, Muhammad Nassir	2013	Analisis Faktor-aktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah Provinsi Aceh.	Jumlah penduduk PDRB Pengeluaran pemerintah inflasi	Berdasarkan uji F membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (PDRB/Pengeluaran Pemerintah) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, sedangkan dari uji t menunjukan ahwa variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD dan variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD.
25	Ida Bagus Gde Wirakusuma, I Dwa Gede Rastana, dan I Nyoman Ariana Guna	2016	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan	Retribusi Daerah Laba Usaha Daerah Penerimaan Pendapatan Lain-lain	Variabel Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah dan Penerimaan Pendaoatan Lain-lain mempunyai pengaruh nyata dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
26	Atni Fisanti	2013	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu	PDRB	Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
27	Robbi Indraguna M.A.	2011	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember	PDRB Jumlah penduduk Inflasi	Variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dalam jangka panjang. PDRB dan jumlah Penduduk berpengaruh signifikan, namun inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap di Kabupaten Jember walau masih menjukan pengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Jember.
28	Dea Oktari, Yolamalinda, dan Joalianis	-	Faktor-Faktor yang memperngaruhi Pendapatan Asli daerah Provinsi Sumatera Barat	Pajak kendaraan bermotor Retribusi pasar Jumlah penduduk	Berdasarkan uji t pajak kendaraan dan jumlah pendudul berpengaruh positif dan signifikan dan uji t restribusi pasar tidak positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan uji F semua variabel berpengaruh positif dan signifikan

					terhadap PAD.
29	Muchtolifah	2010	Analisis Beberapa Faktor yang mempengaruhi Pendapaan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya	Jumlah perusahaan Tingkat inflasi Jumlah hotel Jumlah pelanggan listrik	Jumlah perusahaan, tingkat inflasi jumlah hoel dan jumlah pelanggan listrik secara simultan berpengaruh nyata terhadap PAD. Sedangkan secara pasrial jumlah pelanggan listrik berpengaruh nyata terhadap PAD, dan jumlah perusahaan inflasi dan jumlah hotel tidak berpengarunterhadap PAD.
30	Indra rindu Datu K	2012	Analisis Faktor yang Mempengarhi Pendapatan Asli Daerah di Makassar tahun 1999-2009	Pengeluaran Pemerintah PDRB	Pengeluaran Pemerintah dan PDRB berpengaruh positif dan sgnifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
31	Ahmad Ramadhan Harahap	2014	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara	Pajak Retribusi Pendapatan asli lain PDRB Konsumsi Jumlah Penduduk	Konsumsi dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan. Variabel jumlah penduduk berpengaruh negative dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan variabel pajakmdaerah tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
32	Nuwun priyono	2011	Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap realisasi pendapatan Asli Daerah (studi kasus kota Magelang periode tahun 2001-2010)	Jumlah penduduk PDRB Jumlah Industri Jumlah Pengeluaran Pemerintah Daerah	PDRB, jumlah pendudukk, jumlah industry dan jumlah pengeluaran secara simultanterhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara parsial menunjukan bahwa hanya variabel PDRB berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan asli Daerah. Dan variabel lain tidak berpengaruh secara parsial terhadap realisaasi Pendapatan Asli Daerah
33	Lina Amalina Adani	2015	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 1996-2012	PDRB Jumlah industry kecil dan rumah tangga Jumlah wisatawan Jumlah tenaga kerja Tingkat inflasi	Variabel PDRB dan jumlah industri kecil dan rumah tangga berpengaruh positif terhadap PAD. Variabel wiaasawatan berpengaruh negative terhadap PAD Variabel jumlah tenaga kerja dan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD.

34	Novianti Hendriyani	2017	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah	Pengeluaran pemerintah Jumlah penduduk inflasi	Hasil peneliatian menunjukan bahwajumlah penduduk berpengaruh signifikanterhadap PAD sedangkan pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
35	Putu Lia PerdanaSari	2011	Analisis Variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah provinsi Bali	Jumlah kunjungan wisatawan Tingkat investasi PDRB	Jumlah Kunjungan wisatawan, tingkat investasi dan PDRB sangat berpengaruh signifikan positif terhadap PAD di Provinsi Bali.
36	Rosmeli	2009	Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2000-2008	Pajak daerah Laba BUMD Retribusi daerah PDRB	Selama tahun 2000-2009 PAD Provinsi Jambi sumbangan terbesar oleh pajak daerah, lain-lain Pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan Laba BUMD Laju pertumbuhan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jambi.
37	Pande Paramitha Wulandari dan Anak Agung Ketut Ayuningsari	2014	Analisis variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali	Pendapatan perkapita Tingkat inflasi Investasi Otonomi daerah	Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali Secara parsial pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh signifikan dan positif Sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negative dan signifikan dan otonomi daerah berpengaruh negative dan tidak signfikan terhadap PAD di Provinsi Bali.
38	Jolianis	2012	Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi sumatera Barat	Konsumsi Rumah Tangga Belanja Pembangunan Pendapatan Asli Daerah	Konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah
39	Tohir	2013	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk trhadap PAD di Kota Pontianak	PDRB Pengeluaran Pemerintah Jumlah Penduduk	Secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signiikan terhadap PAD, PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap PAD, dan Jumlah Penduduk

					berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Pontianak.
40	Uun Sunarsih and Ahmad Rifai Sapta	2015	Effect of Regional Gross Domestic Product by Sector of Revenue Region (case study at Regencies / cities in Central Java)	PDRB primer PDRB sekunder PDRB tersier	PDRB primer dan sekunder tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan PDRB tersier berpengaruh signifikan terhadap PAD yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah.
41	Siti Khodijah	2017	Analisis Faktor-faktor yang memperngaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2010-2015	PDRB Jumlah Penduduk investasi	Hasil menunjukan bahwa FEM merupakan model regresi panel yang paling tepat. Berdasarkan uji validitas pengaruh semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
42	Risnawati	1999	Analisis yang Mempengaruhi PAD di Surakarta.	Jumlah penduduk Tenaga kerja PDRB	Semua variabell terdapat hubunganpositif terhadap PAD.
43	Ekasari	1997	Analisis yang Mempengaruhi PAD di Ngawi	PDRB Jumlah penduduk Tenaga kerja	Semua variabel terdapat hubungan yang positif terhadap PAD di Ngawi.
44	Moses Acquah and Alexander Gelardi	2008	The Growth and Stability of Revenues in British Columbia, Canada	Tax and non-tax : the personal income tax, the corporate income tax, the general sales tax, the motor fuel tax, and natural resource revenue. GDPP Inflasi Suku bunga	Artikel ini membahas pertumbuhan dan stabilitas pajak dan non pajak dengan menganalisis perilaku sumber pendapatan pajak penghasilan pribadi, pajak penjualan umum, motor dan pendapatan Sumber Daya Alam.
45	Ronald J Shadbegian	1999	The effect of tax and expenditure limitations on the revenue structure of local government, 1962-87	(1) property taxes per capita (PTAXES); (2) "other" taxes per capita (OTAXES); (3) own-source revenue per capita (OWNREV); (4)miscellaneous revenue per capita (MISCREV).	Hasilnya menunjukkan bahwa hukum TEL lebih ketat berdampak negatif secara signifikan lebih besar pada kedua pajak properti dan pendapatan asli daerah dari hukum TEL kurang ketat; Hal ini juga menunjukkan bahwa undang-undang TEL yang lebih ketat memiliki dampak positif kecil terhadap pajak "lainnya".
46	James Abiola Moses Asiweh	2012	Impact of Tax Administration on Government Revenue in	administrasi Pajak Nigeria dan kapasitasnya	Peningkatan penerimaan pajak merupakan fungsi strategi penegakan efektif

			a Developing Economy – A Case Study of Nigeria	untuk mengurangi penghindaran pajak dan menghasilkan pendapatan untuk keinginan pembangunan rakyat	yang murni tanggung jawab administrasi perpajakan Nigeria tidak memiliki mesin penegakan hukum yang mencakup antara lain, tenaga kerja yang memadai, komputer dan sistem pos dan komunikasi yang efektif. Penelitian ini jelas praktis implikasi bagi praktisi pajak dan pembuat kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang pada khususnya.
47	James E. Payne Georgia College	1998	Government Revenue-Expenditure Nexus. Evidence from Latin America.	Hubungan temporal antara pendapatan dan pengeluaran relative terhadap PDB riil.	Koefisien sehingga secara statistic menunjukan bahwa pengeluaran menyebabkan pendapatan sehingga menunjukan bahwa hipotesis pembelajan pajak. Koefisien signifikan secara statistic menunjukan bahwa pendapatan menyebabkan pebgeluaran sebagai pendukung pengeluaran pajak. Koefisien signifikan secara statistic maka hipotesis sinkronisasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dapat disusun kajian pustaka mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat

disimpulkan bahwa terdapat variabel makro yang dapat mempengaruhi PAD adalah PDRB, PDRBperkapita,PDRB sektor pertanian, PDRB primer, PDRB sekunder, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah rumah tangga dan konsumsi, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah perusahaan,jumlah pengguna hotel, jumlah industry, jumlah pelanggan listrik, tingkat inflasi, tingkat investasi, suku bunga, pengeluaran pemerintah daerah, pajak kendaraan,retribusi pasar serta laba BUMD.

Penelitian-penelitian terdahulu secara umum menggunakan model penelitian data *time series* dengan metode regresi berganda OLS, ECM dan PAM. Beberapa penelitan lain menggunakan data panel, yaitu gabungan data *time series* dan *cross section* dengan metode regresi panel. Penelitian yang dilakukan oleh Iin dalam Eni tahun 2009 menggunakan data *time series* di Kota Semarang pada tahun 2000-2009 dengan model penelitian regresi linear berganda OLS metode ini sama dilakukan oleh Iwan dalam Ghozali yang menggunakan data time series di Kota Malang pada tahun 1998-2012 dengan model penelitian regresi linear berganda OLS. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Erwandi menggunakan data time series di Kabupaten Boyolali pada tahun 1990-2004 dengan model penelitian ECM (*Error Correction Model*), dan penelitian yang dilakukan oleh Rusera Ricko Yunanto yang menggunakan data time series di Kabupaten Klaten tahun 1990-2012 dengan model penelitian PAM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hening Sarastri di

Eks-Karisidenan Pekalongan tahun 2005-2014 menggunakan model penelitian regresi panel.

Hasil yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu diatas adalah bahwa variabel-variabel yang digunakan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Diantaranya Variabel PDRB, PDRBperkapita, PDRB sektor pertanian, PDRB primer, PDRB sekunder, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah rumah tangga dan konsumsi, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah perusahaan,jumlah pengguna hotel, jumlah industry, jumlah pelanggan listrik, tingkat inflasi, tingkat investasi, suku bunga, pengeluaran pemerintah daerah, pajak kendaraan,retribusi pasar serta Laba BUMD mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang mempengaruhi dapat dibuktikan dari Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Retno (2005) yang berjudul "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri", dalam penelitian ini bahwa variabel yang diteliti yaitu total pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk dan PDRB bahwa variabel tersebut mempengaruhi positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Datu (2012) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar tahun 1999-2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengeluaran pembangunan dan PDRB. Hasil penelitian membuktikan bahwa PDRB dan Pengeluaran Pembangunan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Oktari (2013) dengan penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Provinsi Sumatera Barat dengan variabel pajak kendaraan, retribusi pasar dan jumlah penduduk bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Muchtolifah (2010) dengan judul analisis beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya menggunakan variabel jumlah perusahaan, tingkat inflasi, jumlah hotel, jumlah pelanggan listrik bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dari penelitian terdauhulu yangd iambil oleh peneliti, diantaranya lokasi penelitian, kondisi keuangan daerah, variabel penelitian dan periode penelitian. Berbedanya penelitian ini dengan penelitian terdahulu, lebih didasarkan pada asumsi bahwa setiap daerah memiliki kompleksitas dan permasalahan, kondisi serta potensi ekonomi yang berbeda-beda. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerah guna menunjang PAD, dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, agar nantinya bermanfaat untuk menambah penerimaan daerah.

2.2. LANDASAN TEORI

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2003, pendapatan daerah adalah semua hak pmerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sedangkan yang dapat dikategorikan dengan pendapatan daerah dalam undang-undang tersebut adalah : PAD, Dana Perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK serta lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan dari pendapatan darah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari atas :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah digolongkan ke dalam dua ketegori menurut tingkat Pemerintah Daerah, yaitu : Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.Sesuai dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi darah. Jenis-jenis pajak Provinsi terdiri dari :

a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
b. Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan D atas air.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Pengambilan dan Pemnafaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagim enjadi beberapa sebagai berikut, Pajak hotel, pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)
2. Sebagai alat pengatur (regulatory)

Adapun ciri-ciri pajak daerah yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung
4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran Negara

b. Retribusi Daerah

Pemerintah Pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya

UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ciri-ciri retribusi Daerah:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan Negara.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh darah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintagh daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih Perusahaan daerah baik bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.Lain-lain pendapatan yang sah antara lain terdir dari hasil penjualan asset

tetap daerah dan jasa giro. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daera yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan miik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusaahan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah menurut Soelarno (1990) dalam Ali chakim (2011) adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan buka hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas. Juga buka merupakan hasil pelaksanaan kewenangan perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan. Merupakan sumber yang buka dari pajak daerah, bukan hasil retribusi daerah juga bukan hasil perusahaan daerah.

untuk Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, diseidakan menganggarkan penerimaan daerah yang

tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yangtermasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan adalag nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2.2 PDRB perkapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu perekonomian (daerah) dalam waktu satu tahun. Dalam konsep perhitungan PDRB, terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan penerimaan dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan PDRB perkapita adalah jumlah total PDRB dibagi dengan

jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin besar tarif pajak, pendapatan disposabel akan menurun yang pada gilirannya akan menurunkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Tetapi, pajak tersebut akan menambah penerimaan pemerintah untuk membiayaan program pembangunan tersebur selanjutnya akan mendorong peningkatan produksi dan PDRB perkapita. Peningkatan PDRB perkapita tersebut akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah lainnya. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuannya untuk membayar (abilty to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan pajak daerah yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, Mungrave(1991) menyatakan bahwa ada tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasae basis pemungutan pajak tersebut meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pendapatan dan perusahaan (income and corporate), konsumsi (consumption), dan kekayaan (wealth). Berdasarkan pendapat Fisher tersebut, maka pajak daerah yang berbasis konsumsi. Senada dengan pendapat tersebut Devas dkk(1989) mengemukakan bahwa pajak penerangan jalan adalah konsumsi listrik masyarakat.

Menurut Peacock dan Wiseman tahun 1961 menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak

yang semakin meningkat dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Sehubungan dengan peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Miller dan Russex (1997), meneliti pengaruh struktur fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat, mengatakan bahwa, pertama, peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pengeluaran untuk pendidikan atau transportasi public dapat ditekan atau coorporate income tax ditingkatkan, kedua, apabila sales tax dan pajak lainnya digunakan untuk transfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, tapi apabila coorporate income tax digunakan untuk trabsfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Ketiga, pajak akan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan negara digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi dan keamanan publik.

2.2.3. Jumlah Penduduk

Dalam arti luas penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Bahkan populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya. Pertumbuhan penduduk (population growth) di

suatu negara adalah peristiwa berubahnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya penambahan alami dengan migrasi neto. Pertambahan alami (natural increase) adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Migrasi neto (net migration) adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah imigran dan jumlah emigrant (Irawan,1996).

Penambahan penduduk yang tinggi serta diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhioleh jumlah penduduk yang ada. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapay ditarik yang berasal dari pajak, retribusi maupun lain-lain pendapatan yang sah juga akan meningkat (Rahayu,2005).

2.2.4 Pengeluaran Pemerintah

Belanja daerah adalah semua pengeliuaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun tertentu. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran

yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun yang akan menjadi pengeluaran pemerintah (Warsito Utomo,2005:74).

Menurut Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Menurut Teori Rostow dan Musgrave, dimana mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah terhadap dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio-rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu dikarenakan pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini

banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negative, misalnya pencemaran lingkungan.

Studi yang dilakukan oleh Booth (1982) yang secara langsung memperlihatkan ekssernahsin pengeluaran pemerintah terhadap produk dalam negeri yang pada gilirannya akan mendorong pemungutan pajak sebagai hasil perkembangan produksi dan investasi dalam negri.

2.2.5. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Boediono,1994). Kenaikan harga dari satu/dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Tingginya inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat yang tidak dibarengi dengan meningkatnya penawaran agregat. Meningkatnya permintaan agregat terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dapat mengalami peningkatan dalam waktu yang relative tetap dalam waktu yang singkat, karena menyangkut kapasitas produksi. Dengan demikian dalam jangkawaktu pendek pengendalian inflasi dilakukan dengan pengendalian permintaan agregat (Soediyono,1992).

2.2.6. Hubungan PDRB perkapita dengan PAD

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita diperoleh dari berbagagi pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestic bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita menunjukan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indicator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertenu biasanya satu tahun.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro,2006)

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk

membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Semakin tinggi pendapatan perkapitasuatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

2.2.7. Hubungan Jumlah Penduduk dengan PAD

Menurut Susanto (2014:27) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk, besar kecilnya pendapatan dapat di pengaruhi oleh jumlah penduduk, besar kecilnya pendapatan dapat di pengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika junlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat. Besar kecilnya pajak dan retribusi yang akan diperoleh suatu daerah ditentukan oleh seberapa besarnya jumlah penduduk. Maka, jumlah penduduk sangat berperan dalam hal meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sector pajak maupun retribusi dari daerah tersebut.

Pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui pertumbuhan tingkat dan ekspansi pasar baik dalam negri maupun luar negri. Pertambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan tekonologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk sebagia unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk naik maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. (Santoso, 2005)

Menurut Adam Smith, besarnya jumlah penduduk merupakan faktor produksi yang potensial apabila perekonomian dalam keadaan yang *full employment* atau semua tenaga kerja dapat di manfaatkan secara produktif dalam proses produksi sehingga besarnya jumlah penduduk akan diikuti dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dan naiknya pendapatan perkapita penduduk yang akan berpenharuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.2.8. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PAD

Menurut (Mardiasmo,2004) Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yakni yang berkaitan dengan retribusi. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan public tidak mengalami penigkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan public. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah yaitu pembangunandan perbaikan sector pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarajat menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas diberbagai sector, produktifitas masyarakat diharapkan meningkat. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya Tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik maka membuat masyarakat aab lebh aktif dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada peningkatan PAD.

Menurut Wong dalam Adi (2006), pembangunan infrastruktur industry mempunyai dampak nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Paajak dan retribusi yang merupakan komponen PAD merupakan nilai tambah yang diperoleh dari sector industri yang berkembang optimal. Sector industry tersebut adalah berasal dari belanja modal. Strategi alokasi pada belanja modal akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Belanja modal diantaranya adalah belanja modal tanahm belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal alat-alat angkutan, belanja modal alat-alat berat dan belanja modal lainnya.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli

barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Peran Pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai fasilitator sehingga membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalma rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk memperlancar kegiatan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur. Anggaran belanja tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Sukirno,1994). Meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

2.2.9. Hubungan Inflasi dengan PAD

(Case dan Fair, 2006) fakta bahwa ekspektasi bisa mempengaruhi tingkat harga. Ekspektasi bisa menyebabkan kita takut akan perubahan harga. Jika harga naik dan jika ekspektasi atas dasar perilaku penetapan harga sebelumnya maka perusahaan mungkin akan terus menaikkan harga meskipun permintaan melambat atu menyusut.

Jika Bank Sentral menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak akan melihat upah riil mereka naik dengan lebih cepat. Ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun, dan akibatnya akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil

(Mankiw,2006). Simanjuntak dalam halim (2001) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang pencapaianya didasarkan pada omzet penjualan misalnya, pajak hotel dan pajak restoran.

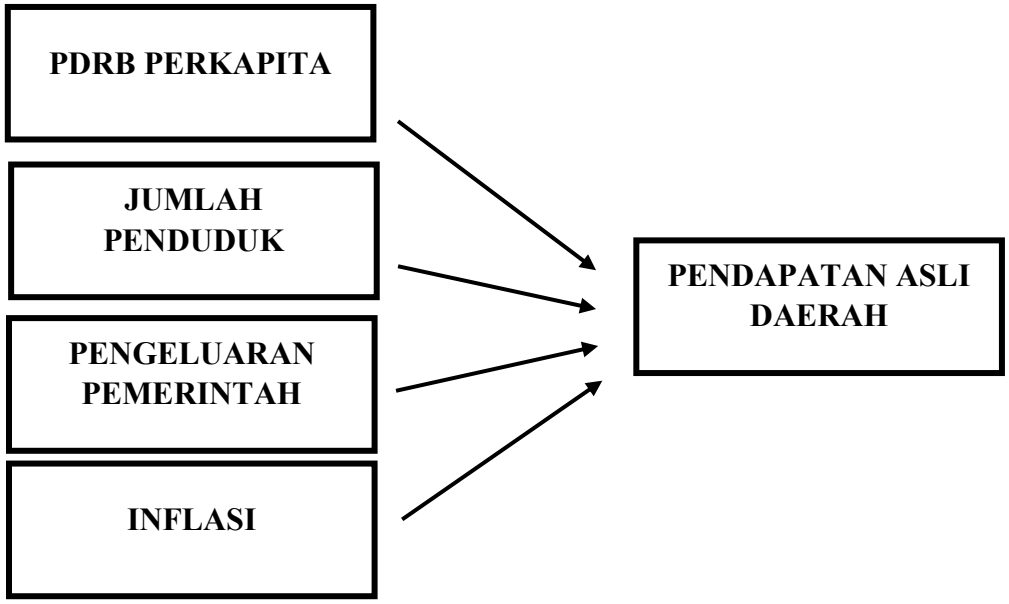
Nopirim (1987), pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan yang presentasenya lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan presentase yang lebih besar dari pada laju inflasi. Adanya serikat buruh yang kuat kadang kala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan presentase yang lebih besar dari jumlah inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebbkan pola pembagian pendpatan dan kekayaan masyarakat.

Jumlah uang beredar menentukan tingkat inflasi, semakin banyak uang yang beredar maka inflasi semakin tinggi. Inflasi dianggap sebagai masalah dalam perekonomian karena menurunkan daya beli masayarakat. Tetapi sebenarnya tidak ada yang berubah, dengan adanya inflasi mak upah atau gaji juga naik, karena upah riil bergantung pada produktivitas marjinal tenga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk setiap tahun, yang mengakibatkan pendapatan pengusaha lebih besar dan akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih

kecil. Dalam hal ini pemerintah mengenakan pajak untuk memberikan potensi penerimaan daerah lebih banyak.

2.3. KERANGKA PENELITIAN

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, PDRB perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih

baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata (Nugraheni dalam Prasetya,2010). Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah akan mempertinggi kegiatan ekonomi daerah dan semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut

Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sector produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan daerah (Adriani,2008).

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dari fasilatator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksanaanya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut

akan meningkatkan pengeluatan agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD akan meningkat. (Husna,2015)

Inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

2.4. HIPOTESIS

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, maka kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Inflasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dibuat dan dikumpulkan oleh orang lain yang digunakan yang digunakan penulis dalam kurun waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari data cross section data data time series. Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan berbagai sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah di 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel independennya yaitu Jumlah Produk Domestik Regional Bruto perkapita, Jumlah Penduduk, Jumlah Pengeluaran Pemerintah dan presentase inflasi. Kurun waktu yang penulis teliti yaitu periode tahun 2012-2016.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Variabel Dependen

Yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian yaitu Pendapatan Asl Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih dari sumber ekonomi asli Kota dan Kabupaten provinsi Jawa Tengah dan dihitung dengan Ribu rupiah. Data PAD ini merupakan data Pendapatan Asli Daerah per kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2012-2016.

2. Variabel Independen

Yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen yang diambil yaitu PDRBperkapita, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan inflasi di Provinsi Jawa Tengah Perkabupaten dan kota dalam kurun waktu 2012-2016.

a. PDRB perkapita

Menurut BPS, PDRB perkapita adalah nilai produksi dari pendapatan setiap jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk, yang bisa sebagai gambaran Daya Beli Masyarakat di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan dihitung Rupiah.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk didefinisikan sebagai penghuni atau merupakan semua orang yang mendiami wilayah Kota dan Kabupaten provinsi Jawa Tengah dan dihitung per jiwa.

c. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak di kota dan kabupaten Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan Ribu rupiah.

d. Inflasi

Inflasi adalah kejadian apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum di Kota dan Kabupaten provinsi Jawa Tengah naik secara terus-menerus dalam jangka panjang yang diukur dengan presentase.

3.3. Metode Analisis yang Digunakan

Untuk mencapai tujuan penelitian dan pengujian hipotesis, penelitin ini menggunakan model regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Eviews 8. Sedangkan model estimasi yang digunakan yaitu menggunakan regresi data panel dan evaluasi regresinya meliputi uji kebaikan garis rergresi, uji kelayakan model, dan uji signifikansi variabel independen.

Evaluasi kebaikan garis regresi yang dilihat dari R-square akan menunjukkan berapa besar (presentase) variabel dependen dapat dipengaruhi

oleh variabel independen. Evaluasi kelayakan model akan menunjukkan apakah model tersebut signifikan dan layak. Sedangkan uji signifikansi variabel akan menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel indepenen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yaitu gabungan antara data time series dan data cross section.untuk meningkatkan *degree of freedom*. Peneliti menggunakan data time series dalam kurun waktu 2012-2016, dan data cross section 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Model fungsi yang digunakan untuk melihat Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

PAD = f (PDRBperkapita, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi)

$Yit = \beta0 + \beta1\ PDRBKit + \beta2\ POPit + \beta3\ GOVit + \beta4\ INFit$

Keterangan :

Y_{it} = Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)

PDRBK = Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Rupiah)

POP = Jumlah Penduduk (Jiwa)

GOV = Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)

INF = Inflasi (%)

B0 = Konstanta

i = Kabupaten/Kota

t = Tahun

Berdasarkan formula diatas diketahui bahwa variabel dependen (PAD) dipengaruhi oleh variabel independen (PDRBK, POP, GOV, INF). Dalam mengestimasi regresi data panel, ada 3 macam pendeketan yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Models*, *Fixed Effect Models*, dan *Random Effect Models*.

3.3.1. Common Effect Model

Regresi model Common Effect berasumsi bahwa intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu. Adanya perbedaan intersep dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan (error atau residual). Dalam persamaan matematis asumsi tersebut dapat dituliskan β0 (slope), βk (intersep) akan sama (konstan) untuk setiap data time series dan cross section. Persamaan matematis untuk model Common Effect akan mengestimasi β0 dan βk sebagai berikut:

$$Yit = \beta0 + \beta1\ PDRBKit + \beta2\ POPit + \beta3\ GOVit + \beta4\ INFit$$

Keterangan :

Y_{it} = Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)

PDRBK = Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Rupiah)

POP = Jumlah Penduduk (Jiwa)

GOV = Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)

INF = Inflasi (%)

B0 = Konstanta

i = Kabupaten/Kota

t = Tahun

3.3.2. Fixed Effect Model

Pengertian model Fixed Effect adalah model dengan intersep berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Model ini dikenal dengan model regresi efek tetap (*fixed Effect*) maksudnya adalah bahwa satu objek obseravasi memiliki kostanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya akan tetap besarnya dari waktu kewaktu.

$PADit = \beta0 + \beta1\ PDRBKit + \beta2\ POPit + \beta3\ GOVit + \beta4\ INFit + \sum_{k=1}^{n} \propto k\ D_{ki} + e_{it}$

Keterangan :

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)

PDRBK = Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Rupiah)

POP = Jumlah Penduduk (Jiwa)

GOV = Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)

INF = Inflasi (%)

B0 = Konstanta

i = Kabupaten/Kota

t = Tahun

D = Dummy lokasi Kabupaten/Kota

3.3.3. Random Effect Model

Menganalisis regresi data panel dapat juga dilakukan menggunakan efek random. Bahkan dapat dikatakan bahwa model Random Effect merupakan alternative solusi jika model Fixed Effect tidak tepat. Metode ini memilih estimasi data paneld engan residual yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap objek mempunyai intersep. Namun diasumsikan bahwa intersep adalah variabel random. Persaman sistematis untuk model Random Effect yaitu:

$PADit = \beta0 + \beta1\ PDRBKit + \beta2\ POPit + \beta3\ GOVit + \beta3INFit + \sum_{k=1}^{n} \alpha k\ D + eit$

$\beta_{0i} = \beta_0 + \mu_i$

$PAD_{it} = \beta0 + \beta1\ PDRBKit + \beta2\ POPit + \beta3\ GOVit + \beta3INFit + (\ eit + \mu_i\ )$

$PADit = \beta0 + \beta1\ PDRBKit + \beta2\ POPit + \beta3\ GOVit + \beta3INFit + V_{it}$

Keterangan :

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)

PDRBK = Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Rupiah)

POP = Jumlah Penduduk (Jiwa)

GOV = Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)

INF = Inflasi (%)

B0 = Konstanta

i = Kabupaten/Kota

t = Tahun

D = Dummy lokasi Kabupaten/Kota

3.4. Pengujian Pemilihan Model

Untuk menguji pemilihan model terbaik dari ketiga model pada regresi data panel, ada dua tahap yaitu : pertama, uji *Chow Test* (Uji F) untuk membandingkan antara metode *Fixed Effect* dengan *Common Effect*. Kedua, uji *Haussman* yaitu untuk membandingkan antara metode *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

1. Uji *Chow*

Chow Test menyebutkan sebagai pengujian F-statistik adalah pengujian untuk memilih model apakah teknik regresi data panel *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi *Common Effect*. Dalam pengujian ini dilakukan dengan ipotesa sebagai berikut:

H0 : *Common Effect Models* lebih baik

Ha : *Fixed Effect Models* lebih baik

$$F = \frac{(RRS1 - RSS2)/m}{(RRS2)/(n-k)}$$

Dimana :

RSS1 = Residual Sun Square pendugaaan model *fixed effect*

RSS2 = Residual Sun Square pendugaaan model *pooled lead square*

n = jumlah data *cross section*

m = jumlah data *time series*

k = jumlah variabel penjelas

Jika nilai Chow statistic (F-statistik) lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak dan menerima Ha, artinya model yang terbaik yaitu *Fixed Effect*. Begitupun sebaliknya.

2. Uji *Haussman*

Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk membandingkan apakah teknik regresi Fixed Effect lebih baik disbanding *Random Effect.*

Test dilakukan dengan hipotesa:

H0 : *Random Effect Models* lebih baik

Ha : *Fixed Effect Models* lebih baik

$$m = q\ vqr\ (q)^{-1}\ q$$

Dimana:

q = $(\beta_{OLS} - \beta_{GLS})$

var (q) = var(β_{OLS})-var (β_{GLS})

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statstik Chi-Square dengan *degree of freedom* sebanyak k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistic Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka H0 ditolak dan menerima Ha. Artinya model yang paling baik yaitu *Fixed Effect*. Begitupun sebaliknya.

3.5. Uji Statistik

3.5.1. Uji Determinasi (R^2)

Mengukur proporsi atau presentase variasi total dalam variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya.

Apabila R^2 bernilai 0 maka tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Semakin besar nilai R^2 berati semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi.

3.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultam (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang digunakan yaitu:

H0 : $\beta 0 = \beta 1 = \beta 2 = \beta 3 = \beta 4 = 0$

Ha : minimal ada satu koefisien regresi ≠ 0

Menghitung F statistik:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Dimana :

(k-1) = numerator

(n-k) = denumerator

Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen, begitupun sebaliknya. Sedangkan jika membandingkan nilai probabilitasnya yaitu bandingkan dengan alfanya. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa berarti independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen, begitupun sebaliknya

3.5.3. Uji Signifikansi Paramter Individual (Uji t)

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H0 : β1= 0

Ha : β2 ≠ 0

B1 > 0 : Positif

B1 < 0 : Negatif

$$t_{hitung} = \frac{\beta i}{Se\ \beta i}$$

Keterangan =

t = Nilai $t_{statistik}$

βi = Koefisien regresi

Seβi = standar error β1

Uji t ini dilakukan dengan mebandingkan t hitung dengan t kritis. Apabila t hitung > t kritis maka H0 ditolak. Artinya variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika t hitung < t kritis maka maka avriabel independen secara individu tidak mempengaruhi variabel dependennya.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Diskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data PAD (Y), PDRB perkapita (PDRBK), Jumlah Penduduk (POP), Pengeluaran pemerintah (GOV) dan Inflasi (INF). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statisitik. Jenis data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan antara data *time series* dari tahun 2010-2016 dan *data cross section* 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu *Eviews 8.*

4.2. Deskripsi Objek Data Penelitian

Gambaran data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaiberikut.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penelitian Simanjuntak (2001:103) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Komponen PAD terdiri dari pajak,retribsusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat peting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Menurut pendapat Koswara, menyatakan pentingnya PAD sebagai sumber keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. (Koswara,1999:23)

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari pendapatan pajak, retribusi, laba BUMD dan penerimaan daerah dan pendapatan lain-lain yang mengalami fluktuasi. Berikut adalah gambaran PAD Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah
Tahun 2012-2016 (Ribu rupiah)

Kota/Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016
Cilacap	90370471	278890649	374023664	409845660	502074910
Banyumas	188589671	308849434	435597689	385677609	557383333
Purbalingga	91191270	122858740	202593691	180202572	251861669
Banjarnegara	63548916	98975319	161652538	135711381	221048387
Kebumen	79175978	131481737	242079502	173507685	291283790
Purworejo	77073808	127565801	200258601	233934134	255460268
Wonosobo	55401343	108729508	175319365	145151252	177947569
Magelang	95290105	173253652	242448677	200653763	288485678
Boyolali	108796100	160752450	227516496	221873999	292310032
Klaten	75875326	115441420	177923444	156097966	224197408
Sukoharjo	124642660	192971720	264814414	235933524	363163428
Wonogiri	75187258	111592606	182149063	174557497	218604854
Karanganyar	89499158	161715928	215298860	181061011	250472357
Sragen	89875454	146721552	254392450	195290956	297176332
Grobogan	84755391	143586364	235295347	208438724	299211316
Blora	61400000	94917900	144724170	130000000	183649909
Rembang	89947696	126808084	179642188	182191199	234168365
Pati	131187727	169127416	279254884	243577485	321970325
Kudus	113622250	144995092	234073380	244741959	291805510
Jepara	103713877	133778155	231673060	193119187	322509752
Demak	78032015	138214446	220329949	206843460	287457500
Semarang	129934492	215679554	248213020	238219647	318536000
Temanggung	66428523	102080198	160726945	152160724	281328148
Kendal	87150664	136029703	215294087	171179320	263274261
Batang	56175216	143502571	172638217	149106696	209957559
Pekalongan	86764834	148496886	255037017	238975251	310572581
Pemalang	77349379	136362282	217345440	190241690	275458054
Tegal	89974465	156244860	253716603	255732920	316051189
Brebes	160496104	135055401	267772513	262781937	339156063
Kota Magelang	63085389	107739839	164927631	131399601	220315949
Kota Surakarta	189736947	298400847	335660207	341533937	452502779
Kota Salatiga	63280944	106100451	165747645	167010555	203768652
Kota Semarang	660372318	925919311	1138346451	1052736041	1337270289
Kota Pekalongan	91205776	114252439	144075424	152044594	178602865
Kota Tegal	117210496	176377335	241936168	271601410	287342170

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Adapun daerah yang mengalami fluktuasi adalah Kab Banyumas,Kab

Kebumen,Kab Wonosobo, Kab Magelang,Kab Wonogiri, Kab Grobogan, Kab Pati, Kab Demak, Kab Pekalongan, Kab Pemalang dan Kota Magelang. Terdapat pula beberapa daerah yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kota Semarang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Jawa Tengah ditahun 2016 dengan angka 1.337.270.289 disusul oleh Kabupaten Banyumas dengan angka 557.383.333 dan Kota Surakarta dengan angka 452.502.779. Kota Pekalongan memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah di Provinsi Jawa Tengah dengan angka 178.602.865.

4.2.2. PDRBperkapita

Menurut penelitian Lestari, PDRB perkapita merupakan nilai produksi dari pendapatan setiap jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk, yang bisa sebagai gambaran Daya Beli Masyarakat. Suatu perekonomian suatu daerah sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan,, maka ini terdapat pembangunan ekonomi.

Tabel 4.2

Produk Domestik Regionanl Bruto Perkapita Kabupaten/Kota

Tahun 2012-2016 (Rupiah)

Kabupaten/kota	Produk Domestik Regional BrutoPerkapita (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cilacap	18794599	19716532	20751023	21786030	22784292
Banyumas	16340000	17310000	18120000	19050000	20020000
Purbalingga	13650758	14222935	14763255	15414074	15991385
Banjarnegara	13050000	14330000	16010000	17570000	19000000
Kebumen	12910000	14040000	15790000	17520000	18770000
Purworejo	14902538	16247084	17881796	19492028	21003628
Wonosobo	14256000	15277000	16812000	18216700	19682100
Magelang	13180800	13930000	14478000	15076900	16760000
Boyolali	17980000	19748000	22047000	24303000	26750000
Klaten	16700000	17620000	18560000	19470000	20390000
Sukoharjo	21790000	22840000	23870000	25010000	26210000
Wonogiri	15560000	16240000	17030000	17890000	18750000
Karanganyar	21900000	22920000	23890000	24860000	25960000
Sragen	20620000	21910000	23040000	24330000	25660000
Grobogan	11457705	12441910	13528302	14933887	16002100
Blora	13266060	13904971	14446015	15151903	18632511
Rembang	15370179	16062904	16746175	17522699	18763960
Pati	17543899	18334135	19067478	20083192	21760890
Kudus	71760000	73920000	76240000	78240000	80220000
Jepara	13054447	13546739	13986099	14474901	14980208
Demak	11845959	12333748	12726726	13340880	13871630
Semarang	25306396	26442587	27606516	28744181	29862393
Temanggung	14821527	15437791	16061561	16741855	17423307
Kendal	22938357	24154445	25161731	26288878	27545095
Batang	14514965	15220439	15896055	16587600	17253762
Pekalongan	13289913	13975677	14556129	15142764	15813916
Pemalang	10700000	11756000	13047000	14357000	15509800
Tegal	13313000	14687000	16278000	17953000	19409000
Brebes	14056000	15556700	17422000	19345000	20879000
Kota Magelang	37551651	39665762	43568807	43441130	45566781
Kota Surakarta	47851639	50595502	53019457	55663901	58391332
Kota Salatiga	41445000	44745000	48967000	52867000	56617000
Kota Semarang	61707236	66152204	72988609	78890738	84417319
Kota Pekalongan	19945000	21998700	24512000	26245000	28435000
Kota Tegal	34490000	37460221	41065676	44632875	48082843

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai indicator pendapatan masyarakat pertahun dengan menggunakan harga berlaku tahun 2012

hingga 2016 secara umum beberapa daerah mengalami fluktuasi. Terdapat daerah yang memiliki PDRB perkapita tertinggi yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta, dan daerah yang memiliki PDRB perkapita terendah yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Pada tahun 2016 Kota Semarang memiliki PDRB perkapita sebesar 84.417.319 dan Kota Surakarta sebesar 58.391.332. Daerah yang memiliki PDRB perkapita rendah yaitu Kabupaten Demak memiliki sebesar 13.871.630 dan Kabupaten Jepara sebesar 14.980.208.

4.2.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta menaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara tersebut. Besarnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. (Halim,2001) Pertambahan alami adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Adapun migrasi neto adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah imigran dan jumlah emigran.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)

	2012	2013	2014	2015	2016
Cilacap	1666192	1676098	1685631	1694726	1703390
Banyumas	1589930	1605585	1620772	1635909	1650625
Purbalingga	870423	879880	889172	898376	907507
Banjarnegara	883710	889894	896038	901826	907410
Kebumen	1171998	1176622	1180894	1184882	1188603
Purworejo	702678	705527	708006	710386	712686
Wonosobo	765113	769396	773391	777122	780793
Magelang	1209486	1221673	1233701	1245496	1257123
Boyolali	945511	951809	957913	963690	969325
Klaten	1143676	1149002	1154028	1158795	1163218
Sukoharjo	841773	849392	856861	864207	871397
Wonogiri	938704	942430	945682	949017	951975
Karanganyar	831891	840199	848326	856198	864021
Sragen	868090	871991	875615	879027	882090
Grobogan	1328183	1336317	1343985	1351429	1358404
Blora	840193	844325	848387	852108	855573
Rembang	603573	608891	614065	619173	624096
Pati	1210001	1217930	1225603	1232889	1239989
Kudus	800403	810893	821109	831303	841499
Jepara	1135628	1153321	1170785	1188289	1205800
Demak	1082498	1094495	1106209	1117905	1129298
Semarang	960497	974115	987597	1000887	1014198
Temanggung	724688	731927	738881	745825	752486
kendal	918798	926791	934627	942283	949682
Batang	722596	729591	736497	743090	749720
Pekalongan	854396	861125	867701	873986	880092
Pemalang	1274606	1279581	1284171	1288577	1292609
Tegal	1409424	1414983	1420106	1424891	1429386
Brebes	1756018	1764982	1773373	1781379	1788880
Kota Magelang	119416	119879	120438	120792	121112
Kota Surakarta	505401	507798	510105	512226	514171
Kota Salatiga	175989	178719	181304	183815	186420
Kota Semarang	1616494	1644374	1672994	1701114	1729083
Kota Pekalongan	288001	290903	293718	296404	299222
Kota Tegal	242714	243901	244978	246119	247212

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi pada periode 2012 hingga 2016. Kabupaten dengan penduduk yang tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes dan Kota Semarang. Pada tahun 2016 Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk

sebesar 1.788.880 jiwa, kemudian diikuti oleh Kota Semarang dengan jumlah penduduk sebesar 1.729.083 jiwa. Kabupaten/Kota dengan memiliki penduduk yang rendah adalah Kota Magelang dan Kota Salatiga. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki jumlah penduduk sebesar 121.112 jiwa dan Kota Salatiga memiliki jumlah penduduk sebesar 186.420 jiwa.

4.2.4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun tertentu. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran kewajiban daerah dalam satu tahun yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.

Tabel 4.4

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cilacap	1226680481	2398465360	2709950456	2531654117	2657124480
Banyumas	1816435039	2392033240	2660904675	2674535084	2893239158
Purbalingga	1105416754	1270871420	1478794964	1524808370	1813162137
Banjarnegara	1150779899	1453536831	1673744338	1514703372	2017387964
Kebumen	1385663779	1741502725	2154579563	2045629752	2706941770

Purworejo	1118860993	1434782362	1664439267	1669086053	1967709634
Wonosobo	1001909769	1300661597	1574354427	1544984911	1216159387
Magelang	1375098039	1744374754	2084774335	2032872262	2073797409
Boyolali	1240694960	1547703844	1792170694	1860250120	2086513803
Klaten	1468235321	1900177322	2185618603	2086459358	2282330771
Sukoharjo	1115449876	1499991023	1778529385	1785620794	1879860885
Wonogiri	1348233770	1641357828	1891792645	1950391139	2132909652
Karanganyar	1172482484	1545069017	1878127418	1695634199	2313306894
Sragen	1230754715	1661915140	1985175886	1793546862	2116629412
Grobogan	1279930528	1690832188	1877093463	1934005085	2331312039
Blora	1223983408	1443685270	1637166492	1727738333	1964188841
Rembang	1011295095	1232988105	1496654626	1534535519	1734304081
Pati	1494985855	1911582721	2189494031	2072784084	2590156393
Kudus	1212217358	1485465908	1934884873	1856616762	2139509750
Jepara	1248184403	1494043919	1740163429	1751447136	2157976237
Demak	1179784499	1510149145	1799198399	1654231698	2065356316
Semarang	1111123240	1499337468	1681541886	1632541723	1974199000
Temanggung	945615162	1113284529	1372335673	1506620232	1833246496
kendal	1177808583	1529669295	1788407581	1700696392	1681658043
Batang	926456900	1219159796	1357910654	1335329214	1560785414
Pekalongan	1051258584	1144259327	1546716072	1614021597	1252970018
Pemalang	1267467331	1687584290	1886225889	1895458849	2163136735
Tegal	1299550425	1669274719	1994456014	2136841443	2422128524
Brebes	1755035210	2051185346	2425062659	2422986706	2946269402
Kota Magelang	575811064	747083068	845558260	781867908	871186563
Kota Surakarta	1223960128	1591633335	1692022711	1589045771	1680456921
Kota Salatiga	573882186	739237604	924980506	811389283	919667517
Kota Semarang	2213614078	3432028297	4078734286	3654580506	2749339403
Kota Pekalongan	563919275	769993249	852946108	867807179	869324083
Kota Tegal	630526750	801356298	945569657	968519382	1074739580

Sumber: BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 4.4, kondisi pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawatengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat pengeluaran pemerintah tertinggi yaitu Kabupaten Banyumas dan di susul oleh Kota Semarang. Kabupaten Banyumas memiliki pengeluaran pemerintah sebesar 2893239158 dan Kota Semarang memiliki pengeluaran pemerintah sebesar 2749339403. Pengeluaran pemerintah yang paling terendah adalah Kota Pekalongan dan Kota Magelang,

pada tahun 2016 Kota Pekalongan memiliki pengeluaran pemerintah sebesar 869324083 dan Kota Magelang memiliki pengeluaran pemerintah sebesar 871186563.

4.2.5. Inflasi

Inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, sebab nilai uang yang dibelanjakan akan turun. Sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus-menerus akan menyebabkan resesi ekonomi

Tabel 4.5

Inflasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016 (Persentase)

Kabupaten/Kota	Inflasi (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cilacap	6.87	8.37	8.19	2.63	2.77
Banyumas	4.73	8.5	7.09	2.52	2.42
Purbalingga	4.09	9.57	9.08	1.62	2.39
Banjarnegara	4.55	8.35	7.78	2.97	2.87
Kebumen	4.64	10.46	7.36	2.91	2.71
Purworejo	3.66	7.14	8.48	3.45	2.66
Wonosobo	3.84	8.82	8.44	2.71	2.97
Magelang	2.59	8.34	7.91	3.6	2.86
Boyolali	3.45	8.21	7.45	2.58	2.65
Klaten	3.65	7.92	7.76	2.57	2.31
Sukoharjo	4.22	8.42	7.93	2.69	2.34
Wonogiri	3.43	8.6	7.2	2.13	2.94
Karanganyar	3.29	8.7	7.38	2.4	1.93
Sragen	3.74	7.55	8.51	3.05	2.49
Grobogan	4.48	7.88	8.03	3.31	2.41

Blora	3.55	7.94	7.13	2.85	2.14
Rembang	4.28	6.88	7.59	2.66	1.75
Pati	3.92	7.57	8.01	3.23	2.31
Kudus	4.77	8.31	8.59	3.28	2.32
Jepara	4.52	7.95	9.87	4.57	3.45
Demak	4.1	8.22	8.69	2.8	2.27
Semarang	4.56	8.11	8.63	2.85	2.39
Temanggung	4.73	7.01	7.81	2.74	2.42
kendal	3.89	6.9	8.34	4.13	2.47
Batang	3.83	8.08	7.66	2.94	2.24
Pekalongan	2.96	8.18	8.32	3.42	2.96
Pemalang	4.04	6.52	7.38	3.52	2.33
Tegal	4.13	7.79	8.48	3.64	2.67
Brebes	4.61	9.83	6.2	3.08	2.84
Kota Magelang	6.05	7.79	7.92	2.7	2.25
Kota Surakarta	2.87	8.32	8.01	2.56	2.15
Kota Salatiga	4.12	7.67	7.84	2.61	2.19
Kota Semarang	0.41	8.19	8.53	2.56	2.32
Kota Pekalongan	3.55	7.4	7.82	3.46	2.94
Kota Tegal	0.4	5.8	7.4	3.95	2.71

Sumber: BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 4.5 Tingkat Inflasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi atau pasang surut. Data yang menunjukan bahwa terjadi inflasi yang sangat tinggi ditahun 2013 dan 2014 di semua daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sebesar 5% hingga 11%. Hal ini dapat dipicu faktor kondisi perekonomian di Provinsi JawaTengah yang tidak stabil, sehingga tingkat inflasi menjadi tinggi, dan kenaikan inflasi tersebut mendorong peningkatan harga-harga pada semua barang. Pada tahun 2015 hingga 2016 inflasi diKabupaten dan Kota provinsi Jawa Tengah sudah menurun hingga 2 % sampai 3%. Daerah yang memiliki inflasi

tertinggi pada tahun 2016 adalah Kabupaten Jepara dan Daerah yang memiliki inflasi terendah adalah Kabupaten Rembang.

4.3. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi data panel dilakukan dengan cara 3 alternatif metode pengujian, yaitu *Common Effect Model, Fixed Effect Models*, dan *Random Effect Models* untuk memilih model regresi yang paling baik digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil pengujiannya:

4.3.1. Pengujian Menggunakan *Common Effect Model*

Dalam pendekatan ini intersep dan slope tetap antar waktu dan individu dan tidak ada perbedaan antar objek.

Hasil output pada regresi *Common Effect Model* ditunjukan pada tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6

Hasil Regresi Common Effect Model

Dependent Variable: PAD?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/29/17 Time: 19:38
Sample (adjusted): 1 5
Included observations: 5 after adjustments
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.18E+08	27639845	-7.877387	0.0000
PDRBK?	4.986555	0.491609	10.14334	0.0000
POP?	12.12530	29.92718	0.405160	0.6859
GOV?	0.192162	0.020716	9.275820	0.0000
INF?	-3358930.	2681975.	-1.252409	0.2121

R-squared	0.731050	Mean dependent var	2.19E+08
Adjusted R-squared	0.724722	S.D. dependent var	1.71E+08
S.E. of regression	89705397	Akaike info criterion	39.49012
Sum squared resid	1.37E+18	Schwarz criterion	39.58054
Log likelihood	-3450.385	Hannan-Quinn criter.	39.52679
F-statistic	115.5222	Durbin-Watson stat	0.366441
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data Eviews 8

Berdasarkan pada tabel 4.6 menunjukan slope PDRBK adalah sebesar 4.986555, slope POP sebesar 12.12530, slope GOV sebesar 0.192162 dan slope INF adalah sebesar -3358930. Sementara nilai p-value PDRBK adalah sebesar 0.0000. POP sebesar 0.6859. GOV sebesar 0.0000 dan INF sebesar 0.2121. Bila variabel independen ternilai nol maka variabel dependen (PAD) sebesar -2.18E+08 dan error term sebesar 1.37E+18. Nilai R-quared 0.731050 atau 73,10% dan F-statistic sebesar 115.5222 dengan prop (F-statistic) sebesar 0.0000. Model estimasi pooledleast square adalah sebagai berikut:

PAD_{it} = -218E+08 + 4.986555$PDRB_{it}$ + 12.12530POP_{it} + 0.192162GOV_{it} + (-3358930) INF_{it} + ect

4.3.2. Pengujian Menggunakan *Fixed Effet Model*

Dalam pendekatan ini, slope konstan tetapi intersep berbeda antar individu. Perilaku antar objek berbeda, namun variabel gangguan tidak berhubungan.

Hasil output pada regresi menggunakan metode *fixed effect model* ditunjukan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7

Hasil regresi *Metode Fixed Effect* (Fixed Effect Model atau FEM)

Dependent Variable: PAD?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/29/17 Time: 19:40
Sample (adjusted): 1 5
Included observations: 5 after adjustments
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.35E+09	2.90E+08	-8.095588	0.0000
PDRBK?	8.869943	1.402867	6.322724	0.0000
POP?	2286.204	327.6186	6.978247	0.0000
GOV?	0.091815	0.011337	8.098447	0.0000
INF?	1965731.	1067323.	1.841740	0.0677
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	-1.58E+09			
_BANYUMAS--C	-1.38E+09			
_PURBALINGGA--C	2.14E+08			
_BANJARNEGARA--C	1.44E+08			
_KEBUMEN--C	-5.00E+08			
_PURWOREJO--C	5.99E+08			
_WONOSOBO--C	4.34E+08			
_MAGELANG--C	-5.80E+08			
_BOYOLALI--C	1155100.			
_KLATEN--C	-4.93E+08			
_SUKOHARJO--C	2.58E+08			
_WONOGIRI--C	15928568			
_KARANGANYAR--C	2.12E+08			
_SRAGEN--C	1.70E+08			
_GROBOGAN--C	-8.25E+08			
_BLORA--C	2.45E+08			
_REMBANG--C	8.22E+08			
_PATI--C	-5.91E+08			
_KUDUS--C	-1.64E+08			

_JEPARA--C	-4.19E+08
_DEMAK--C	-2.66E+08
_SEMARANG--C	-76585670
_TEMANGGUNG--C	5.38E+08
_KENDAL--C	10862383
_BATANG--C	5.46E+08
_PEKALONGAN--C	3.15E+08
_PEMALANG--C	-6.94E+08
_TEGAL--C	-1.01E+09
_BREBES--C	-1.85E+09
_KOTAMAGELANG--C	1.76E+09
_KOTASURAKARTA--C	8.86E+08
_KOTASALATIGA--C	1.56E+09
_KOTASEMARANG--C	-1.38E+09
_KOTAPEKALONGAN--C	1.52E+09
_KOTATEGAL--C	1.55E+09

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.972130	Mean dependent var	2.19E+08
Adjusted R-squared	0.964342	S.D. dependent var	1.71E+08
S.E. of regression	32285590	Akaike info criterion	37.61172
Sum squared resid	1.42E+17	Schwarz criterion	38.31702
Log likelihood	-3252.026	Hannan-Quinn criter.	37.89781
F-statistic	124.8356	Durbin-Watson stat	2.456818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa slope PDRBK adalah sebesar 8.869943, slope POP sebesar 2286.204, slope GOV sebesar 0.091815 dan slope INF sebesar 1965731. Sementara nilai p-value PDRBK adalah sebesar 0.0000, POP sebesar 0.0000, GOV sebesar 0.0000 dan INF sebesar 0.0677. Bila variabel independen (PAD) bernilai nol maka angka PAD sebesar -2.35E+09 dan error termnya adalah sebesar 1.42E+17. Nilai R-squared 0.972130 atau 97.23% dan

Fstatistic sebesar 124.8356 dengan Prob (F-statistic) sebesar 0.0000. Model estimasi fixed effect adalah sebagai berikut:

PAD_{it} = -2.35E+09 + 8.869943$PDRBK_{it}$ + 2286.204POP_{it} + 0.091815 GOV_{it} + 1965731INF_{it} + ect

4.3.3. Pengujian Menggunakan Random Effect Model

Dalam model estimasi ini, perilaku antar objek berbeda. Variabel gangguan salig berhubungan antar waktu dan antar individu.

Hasil output pada regresi menggunakan metode fixed effect ditunjukan dalam tabel 4.9.

Tabel 4.8

Hasil regresi Metode Random Effect (Random Effect Model atau REM)

Dependent Variable: PAD?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/29/17 Time: 19:44
Sample (adjusted): 1 5
Included observations: 5 after adjustments
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.43E+08	42060772	-8.148997	0.0000
PDRBK?	8.312004	0.746307	11.13751	0.0000
POP?	118.4044	37.24980	3.178660	0.0018
GOV?	0.150517	0.009066	16.60149	0.0000

INF?	-1241350.	998446.2	-1.243281	0.2155
Random Effects (Cross)				
_CILACAP--C	-36915285			
_BANYUMAS--C	6733549.			
_PURBALINGGA--C	71930037			
_BANJARNEGARA--C	11067771			
_KEBUMEN--C	-38757531			
_PURWOREJO--C	56981803			
_WONOSOBO--C	48917801			
_MAGELANG--C	636435.0			
_BOYOLALI--C	-3183374.			
_KLATEN--C	-87989152			
_SUKOHARJO--C	41016062			
_WONOGIRI--C	-21999147			
_KARANGANYAR--C	-28978023			
_SRAGEN--C	-14113053			
_GROBOGAN--C	-3476062.			
_BLORA--C	4898281.			
_REMBANG--C	84217221			
_PATI--C	-35671630			
_KUDUS--C	-4.20E+08			
_JEPARA--C	38333048			
_DEMAK--C	49156824			
_SEMARANG--C	-4444496.			
_TEMANGGUNG--C	73949581			
_KENDAL--C	-32636069			
_BATANG--C	80633865			
_PEKALONGAN--C	1.30E+08			
_PEMALANG--C	-577628.3			
_TEGAL--C	-25913741			
_BREBES--C	-1.18E+08			
_KOTAMAGELANG--C	8553778.			
_KOTASURAKARTA--C	-61661057			
_KOTASALATIGA--C	-55841335			
_KOTASEMARANG--C	1.04E+08			
_KOTAPEKALONGAN--C	1.27E+08			
_KOTATEGAL--C	52489785			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	80519064	0.8615
Idiosyncratic random	32285590	0.1385

Weighted Statistics

R-squared	0.777187	Mean dependent var	38614850
Adjusted R-squared	0.771944	S.D. dependent var	80804741
S.E. of regression	38588478	Sum squared resid	2.53E+17
F-statistic	148.2426	Durbin-Watson stat	1.693116
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.650815	Mean dependent var	2.19E+08
Sum squared resid	1.78E+18	Durbin-Watson stat	0.241312

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa slope PDRBK adalah sebesar 8.312004, slope POP sebesar 118.4044, slope GOV sebesar 0.150517 dan slope INF sebesar -1241350. Sementara nilai p-value PDRBK adalah sebesar 0.0000, POP sebesar 0.0018, GOV sebesar 0.0000 dan INF sebesar 0.2155. Bila variabel independen (PAD) bernilai nol maka angka PAD sebesar -3.43E+08 dan error termnya adalah sebesar 1.78E+18. Nilai R-squared 0.777187 atau 77.71% dan Fstatistic sebesar 148.2426 dengan Prob (F-statistic) sebesar 0.0000. Model estimasi fixed effect adalah sebagai berikut:

PAD_{it} = -2.35E+09 + 8.312004$PDRBK_{it}$ + 118.4044$_{it}$ POP_{it} + 0.150517 GOV_{it} + (-1241350) INF_{it} + ect

4.3.4. Pemilihan Model Regresi

4.3.4.1 Uji F

Digunakan untuk memilih model paling layak antara *Common Effect Models vs Fixed Effect* Models dengan pengujian terhadap hipotesis :

Ho : *Common Efect Models* lebih layak

Ha : *Fixed Effect Models* lebih layak

Tabel 4.9

Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	34.600213	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	396.718603	34	0.0000

Sumber: hasil olah data eviews 8

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitsnya dengan alfa = 1%. Jika nilai probabilitsnya lebih kecil dari alfa, maka menolak Ho berarti model yang paling layak yaitu *Fixed Effect Models*. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa 1% maka menerima Ho berarti model yang paling layak yaitu *Common Effect Models*.

Dari hasil Uji F diatas dapat dilihat nilai statistic *Chi-square* sebesar 396.718503 dengan probbilitas sebesar 0.0000 yang signifikan dalam alfa 1%, artinya secara statistic Ho ditolak dan menerima Ha, maka model yang paling layak digunakan yaitu *Fixed Effect Models*.

4.3.4.2. Uji Haussman

Digunakan untuk memilih model paling layak antara *Fixed Effect Models vs Random effect Models* dengan pengujian terhadap hipotesis :

Ho : *Random Efect Models* lebih layak

Ha : *Fixed Effect Models* lebih layak

Tabel 4.10

Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Haussman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	76.854843	4	0.0000

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews 8

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitsnya dengan alfa = 1%. Jika nilai probabilitsnya lebih kecil dari alfa, maka menolak H0 berarti model yang paling layak yaitu *Fixed Effect Models*. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa 1% maka menerima H0 berarti model yang paling layak yaitu *Random Effect Models*.

Dari hasil Uji *Haussman* diatas dapat dilihat nilai statistic Chi-square sebesar 76.854843 dengan probbilitas sebesar 0.0000 yang signifikan dalam alfa 1%, artinya secara statistic Ho ditolak dan

menerima Ha, maka model yang paling layak digunakan yaitu *Fixed Effect Models*. Setelah membandingkan hasil kedua uji tersebut, maka bisa disimpulkan model yang paling layak yaitu *Fixed Effect Model*.

4.4. Evaluasi Regresi

4.4.1. Uji kebaikan Garis Regresi (R-squared)

Setelah pemilihan model regresi dan mendapatkan Fixed Effect Models menjadi model yang paling tepat digunakan maka selanjutnya mengukur presentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskaan oleh variabel independennya dalam model regresi. Perhitungan dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis yang ditujukkan oleh koefisien determinasi R^2.

Tabel 4.11

Hasil regresi Model *Fixed Effect (Fixed Effect Model atau FEM)*

Dependent Variable: PAD?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/29/17 Time: 19:40
Sample (adjusted): 1 5
Included observations: 5 after adjustments
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.35E+09	2.90E+08	-8.095588	0.0000
PDRBK?	8.869943	1.402867	6.322724	0.0000
POP?	2286.204	327.6186	6.978247	0.0000
GOV?	0.091815	0.011337	8.098447	0.0000
INF?	1965731.	1067323.	1.841740	0.0677

Fixed Effects (Cross)	
_CILACAP--C	-1.58E+09
_BANYUMAS--C	-1.38E+09
_PURBALINGGA--C	2.14E+08
_BANJARNEGARA--C	1.44E+08
_KEBUMEN--C	-5.00E+08
_PURWOREJO--C	5.99E+08
_WONOSOBO--C	4.34E+08
_MAGELANG--C	-5.80E+08
_BOYOLALI--C	1155100.
_KLATEN--C	-4.93E+08
_SUKOHARJO--C	2.58E+08
_WONOGIRI--C	15928568
_KARANGANYAR--C	2.12E+08
_SRAGEN--C	1.70E+08
_GROBOGAN--C	-8.25E+08
_BLORA--C	2.45E+08
_REMBANG--C	8.22E+08
_PATI--C	-5.91E+08
_KUDUS--C	-1.64E+08
_JEPARA--C	-4.19E+08
_DEMAK--C	-2.66E+08
_SEMARANG--C	-76585670
_TEMANGGUNG--C	5.38E+08
_KENDAL--C	10862383
_BATANG--C	5.46E+08
_PEKALONGAN--C	3.15E+08
_PEMALANG--C	-6.94E+08
_TEGAL--C	-1.01E+09
_BREBES--C	-1.85E+09
_KOTAMAGELANG--C	1.76E+09
_KOTASURAKARTA--C	8.86E+08
_KOTASALATIGA--C	1.56E+09
_KOTASEMARANG--C	-1.38E+09
_KOTAPEKALONGAN--C	1.52E+09
_KOTATEGAL--C	1.55E+09

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.972130	Mean dependent var	2.19E+08
Adjusted R-squared	0.964342	S.D. dependent var	1.71E+08
S.E. of regression	32285590	Akaike info criterion	37.61172
Sum squared resid	1.42E+17	Schwarz criterion	38.31702
Log likelihood	-3252.026	Hannan-Quinn criter.	37.89781
F-statistic	124.8356	Durbin-Watson stat	2.456818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data eviews 8

Hasil output regresi menunjukan adjusted R2 sebesar 0,9721 atau 97,21%, maka interpretasinya adalah 97,21% variabel pendapatan

asli daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah serta inflasi dan sisanya sebesar 2,79% variabel PAD dijelaskan oleh variabel bebas di luar model.

4.4.2. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model ini untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependennya. Caranya dengan membandingkan nilai probabilitasnya dengan alfa.

Dalam uji F prob F-statistic dibandingkan dengan $\alpha = 0{,}05$, Kriteria pengujiannya adalah apabila prob F-statistic > 0.05 maka H0 diterima. Sebaliknya jika prop F-statistic < 0,05 maka H0 ditolak. Adapun formulasi hipotesisnya adalah:

H0 : Secara serempak variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD

Ha : Secara serempak variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh terhadap PAD

Hasil pengujian F-statistic menunjukan prop F-statistic sebesar 0,0000 < 0,05 maka kesimpulannya h0 ditolak, sehingga variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan

inflasi yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD) pada $\alpha = 5\%$.

4.4.3. Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji validitas pengaruh atau uji t menunjuan tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel PDRB per kapita (PDRBK) , jumlah penduduk (POP), pengeluaran pemerintah (GOV) dan Inflasi (INF) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Formulasi hipotesis uji t adalah sebagai berikut :

$H0_1$: variabel PDRBK tidak memiliki pengaruh signifikan

Ha_1 : variabel PDRBK memiliki pengaruh signifikan

$H0_2$: variabel POP tidak memiliki pengaruh signifikan

Ha_2 : variabel POP memiliki pengaruh signifikan

$H0_3$: variabel GOV tidak memiliki pengaruh signifikan

Ha_3 : variabel GOV memiliki pengaruh signifikan

$H0_4$: variabel INF tidak memiliki pengaruh signifikan

Ha_4 : variabel INF memiliki pengaruh signifikan

Kriteria pengujiannya adalah jika prob $> \alpha = 0.05$ maka H0 diterima yang berarti variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan sebaliknya jika prob $< \alpha = 0{,}05$ maka H0 ditolak yang berarti variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan.

Hasil pengujian diperoleh variabel PDRBK p-value 0.0000 < 0.05 maka $H0_1$ ditolak, dengan demikian variabel PDRBK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada α = 5% dengan koefisien regresi sebesar 8.886943. Dengan koefisien regresi sebesar 8.886943 yang artinya bahwa ketika PDRB perkapita naik 1 rupiah maka jumlah PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah akan mengaami kenaikan sebesar 8.886943 Ribu rupiah.

Variabel POP memiliki p-value 0.0000 < 0.05 maka $H0_2$ ditolak, sehingga variabel POP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada α = 5% dengan koefisien regresi sebesar 2286.204. Ketika jumlah penduduk naik 1 jiwa maka PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sbesar 2286.204 Ribu rupiah.

Variabel GOV memiliki p-value 0.0000 < 0.05 maka $H0_3$ ditolak, sehingga variabel GOV memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada α = 5% dengan koefisien regresi sebesar 0.91815. Ketika pengeluaran pemerintah naik 1 Ribu rupiah maka PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 0.091815 Ribu Rupiah.

Variabel INF memiliki p-value 0.0677 < 0.10 maka $H0_3$ ditolak, sehingga variabel INF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada α = 10%

dengan koefisien regresi sebesar 1967531. Ketika inflasi naik 1 persen maka PAD di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 1965731 Ribu Rupiah.

Berdasarkan analisis uji t maka kesimpulannya adalah variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk (POP), Pengeluaran Pemerintah (GOV), dan Inflasi (INF) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada α = 5% dan 10% .

4.4.4. Analisis Perprovinsi

Tabel 4.12

Crosseffect Fixed Effect Models

No	Kabupaten/Kota	Efek	C	Konstanta
1	Cilacap	-1.58E+09	-2.35E+09	-3.93E+09
2	Banyumas	-1.38E+09	-2.35E+09	-3.73E+09
3	Purbalingga	2.14E+08	-2.35E+09	-2.14E+09
4	Banjarnegara	1.44E+08	-2.35E+09	-2.21E+09
5	Kebumen	-5.00E+08	-2.35E+09	-2.85E+09
6	Purworejo	5.99E+08	-2.35E+09	-1.75E+09
7	Wonosobo	4.34E+08	-2.35E+09	-1.92E+09
8	Magelang	-5.80E+08	-2.35E+09	-2.93E+09
9	Boyolali	1155100	-2.35E+09	-2.35E+09
10	Klaten	-4.93E+08	-2.35E+09	-2.84E+09

11	Sukoharjo	2.58E+08	-2.35E+09	-2.09E+09
12	Wonogiri	15928568	-2.35E+09	-2.33E+09
13	Karanganyar	2.12E+08	-2.35E+09	-2.14E+09
14	Sragen	1.70E+08	-2.35E+09	-2.18E+09
15	Grobogan	-8.25E+08	-2.35E+09	-3.18E+09
16	Blora	2.45E+08	-2.35E+09	-2.11E+09
17	Rembang	8.22E+08	-2.35E+09	-1.53E+09
18	Pati	-5.91E+08	-2.35E+09	-2.94E+09
19	Kudus	-1.64E+08	-2.35E+09	-2.51E+09
20	Jepara	-4.19E+08	-2.35E+09	-2.77E+09
21	Demak	-2.66E+08	-2.35E+09	-2.62E+09
22	Semarang	-76585670	-2.35E+09	-2.43E+09
23	Temanggung	5.38E+08	-2.35E+09	-1.81E+09
24	kendal	10862383	-2.35E+09	-2.34E+09
25	Batang	5.46E+08	-2.35E+09	-1.80E+09
26	Pekalongan	3.15E+08	-2.35E+09	-2.04E+09
27	Pemalang	-6.94E+08	-2.35E+09	-3.04E+09
28	Tegal	-1.01E+09	-2.35E+09	-3.36E+09
29	Brebes	-1.85E+09	-2.35E+09	-4.20E+09
30	Kota Magelang	1.76E+09	-2.35E+09	-5.90E+08
31	Kota Surakarta	8.86E+08	-2.35E+09	-1.46E+09
32	Kota Salatiga	1.56E+09	-2.35E+09	-7.90E+08
33	Kota Semarang	-1.38E+09	-2.35E+09	-3.73E+09
34	Kota Pekalongan	1.52E+09	-2.35E+09	-8.30E+08
35	Kota Tegal	1.55E+09	-2.35E+09	-8.00E+08

Pada hasil Tabel 4.11 dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah 35 Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes dan Kota Semarang. Pendapatan Asli Daerah menengah terdapat di Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Magelang. Pendapatan Asli Daerah terendah terdapat di Kota Magelang dan Kota Salatiga.

4.5. Analisis Ekonomi

4.5.1. Analisis Pengaruh PDRBperkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Artinya semakin banyak PDRB perkapita, maka semakin besar pula realisasi pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu kabupaten/kota di Provinsi JawaTengah. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil perhitungan uji t yang menunjukan bahwa PDRB perkapita nilai koefisien regresi yang positif sebesar 8.869943 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.

Nilai PDRB perkapita atau pendapatan perkapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan, sehingga hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah. Maka semakin tinggi pendapatan perkapita di Provinsi Jawa Tengah, semakin besar potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Dengan meningkatnya PDRB perkapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah pemerintah perlu meningkatkan pelayanan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetisi sumber daya manusia, terutama yang berhubungan langsung dengan

kepentingan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pemungutan atau upaya PAD adalah rasio antara total PAD dan PDRB. Meningkatnya PAD melalui besarnya pajak dan retribusi daerah yang diterima dari PDRB yang meningkat setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap laporan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya PAD yang diterima akan meningkatkan APBD di sisi PAD yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti belanja langsung, belanja tidak langsung ataupun pembiayaan daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Lestari (2016) menyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama ini menyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) terbukti dan diterima.

4.5.2. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Artinya semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula realisasi pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu kabupaten/kota di Provinsi JawaTengah.

Hal tersebut dapat dilihat pada hasil perhitungan uji t yang menunjukan bahwa jumlah penduduk nilai koefisien regresi yang positif sebesar 2286,204 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah akan menambah pendapatan suatu daerah, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin besar jumlah pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula yang membayar berbagai pungutan/iuran seperti pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh (Simanjuntak dalam Halim 2001) yang menyatakan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rahayu (2005) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga diperkuat dengan adanya penelitian Triani dan Kuntari (2010) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan Jumlah Penduduk

berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti dan diterima.

4.5.3. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakkan, dapat diketahuii bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pendapatan ali daerah. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan uji t menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,09815 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000.

Pengeluaran Pemerintah yang meningkat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan banyak kegiatan pembangunan diberbagai infrastruktur yang penting, jadi pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan juga akan meningkat. Aktivitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas social yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah meningkatkan pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat.

Meskipun pengeluaran pemerintah dialokasikan terbanyak pada belanja pegawai daripada pengeluaran pembiayaan Pengeluaran

Pemerintah yang cenderung meningkat ini seiring dengan meningkatnya juga PAD. Dari tahun ke tahun pembiayaan pembangunan daerah Kota dan Kabupaten Provinai Jawa Tengah oleh pemerintah daerah semakin meningkat sehingga memicu meningkatnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah, namun tetap mempengaruhi jumlah PAD.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Rahayu (2005) menerangkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam membeli barang ataupun jasa yang digunakan untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, dimana belanja-belanja tersebut dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Datuk Indra (2012) Pengeluaran pemerintah mempunyai efek multiplier terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi daerah melalui pembangunan sekolah, sarana kesehatan, dan sarana infrastruktur, sehingga pengeluaran pemerintah akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti dan diterima.

4.5.4. Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil perhitungan uji t yang menunjukan bahwa variabel inflasi memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 1965731 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,10 yaitu sebesar 0,067.

Inflasi akan meningkatkan penerimaan daerah pendapatan asli daerah yang mana penetapannya didasarkan pada omset penjualan, misalnya pajak hotel dan restaurant. Selain itu inflasi juga dapat berguna dalam pertimbangan perubahan tarif, pajak dan retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Halim dalam Simanjuntak (2001:1) bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan restoran.

Dengan inflasi maka upah atau gaji juga naik karena upah riil bergantung pada produktivitas marjinal kerja. Ketika inflasi naik melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk setiap tahun, yang mengakibatkan pendapatan pengusaha lebih besar dan akan memberi para pekerja kenaikan upah. Ketika tenaga kerja memiliki upah yang lebih, maka dapat membayar pajak dan retribusi sehingga PAD meningkat. Semakin tinggi uang beredar dimasyarakat akan semakin

tinggi peningkatan inflasi dan akan semakin tinggi perolehan pendapatan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Randy dan Kumenaung menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini yang inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti dan diterima.

BAB V
SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto per kapita berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah ini berarti apabila angka PDRB perkapita naik maka diikuti dengan kenaikan angka Pendapatan Asli Daerah. Dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah ini berarti apabila angka jumlah penduduk naik maka diikuti dengan kenaikan angka Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah yang selanjutnya akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berupa pajak daerah.

3. Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yang berate apabila angka pengeluaran pemerintah naik maka diikuti dengan kenaikan angka Pendapatan Asli Daerah. Meskipun pengeluaran pemerintah dialokasikan terbanyak pada belanja pegawai daripada untuk belanja modal. Dengan besarnya belanja modal tersebut tetap mempengaruhi PAD di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yang berarti kenaikan angka inflasi naik maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Inflasi akan meningkatkan penerimaan daerah pendapatan asli daerah yang mana penetapannya didasarkan pada omset penjualan, misalnya pajak hotel dan restaurant. Selain itu inflasi juga dapat berguna dalam pertimbangan perubahan tarif, pajak dan retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil temuan empiris yang didapat dari penelitian ini, maka yang perlu disampaikan yaitu:

1. Untuk meningkatkan PAD Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pengembangan industri di daerah dengan cara

mengoptimalkan potensi daerah. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mendorong pertumbuhan Usaha-usaha kecil dan Menengah sebagai bagian dari sector industri, misalnya dengan pengembangan inovasi produk, serta regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pendapatan perkapita meningkat dan mampu membayar pajak dan retribusi sehingga penerimaan daerah meningkat.

2. Jumlah penduduk sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, seharusnya dioptimalkan yaitu dengan cara meningkatkan jumlah lapangan kerja, serta meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dari penduduk tersebut, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan serta SDM yang tinggi, maka akan menyebabkan semakin besar pula potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Kebijakan pemerintah perlu memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan penduduk. Pemerintah harus lebih bisa memilih membangun infrastruktur baik dari swasta maupun dari pemerintah sendiri, sehingga pada akhirnya infrastruktur yang dibangun benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Inflasi berdampak positif dan negative terhadap PAD, inflasi dapat menaikkan PAD namun inflasi yang tinggi dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi, jadi pemerintah harus mengendalikan inflasi agar tetap stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah dan Halim, 2003. *Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 7, No. 1.

Abiola, Jamesh and Moses Asiweh. 2012. *Impact of Tax Administration on Government Revenue in a Developing Economy – A Case Study of Nigeria*.

Acquah, Moses and Gelardi Alexander. 2008. *The Growth and Stability of Revenues in British Columbia, Canada.*

Adriani, Evi dan Sri Indah Handayani. 2008. *Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin*. Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, Vol. 8, No. 2.

Amalina, Lina Adani. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 1996-2012*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Aryanti, Eni dan Iin Indarti. 2008.*Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No. 2.

Asteria, Beta. (2015). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa tengah*. Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 1: 51-61.

Badan Pusat Statistik. Indonesia dalam angka beberapa terbitan. BPS Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Badan Pusat Statistik. Inflasi Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. BPS Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. BPS Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Badan Pusat Statistik. Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. BPS Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Badan Pusat Statistik. Pengeluaran Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. BPS Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Badan Pusat Statistik. Provinsi Jawa Tengah dalam angka beberapa terbitan. BPS Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Bhaskara, Gde Perwira Jaya. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3, No.5.

Budiharjo, Ari. 2003. *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Thesis Pascasarjana UNDIP. Semarang.

Dara, Janti Berliana dan Ika Kristiani. 2015. *Tingkat Pencapaian Target dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga*. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, November 2015, Hal 152-160.

Datu, Indra Rindu. (2012). *Analisis yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar tahun 1999-2009*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hassanudin. Makassar.

Dessyaratami, Rasya Hanna Putri. 2015. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2012. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Esti, P. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen tahun 1991-2008*. Thesis Pascasarjana, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

F Asmuruf, Makdalena, dkk. 2015. Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, No. 5.

Fisanti, Atni. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Penelitian Universitas Pasir Pengaraian, Vol. 2, No.2.

Fitria, Hening. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karisidenan Pekalongan periode 2005-2014), Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Florentina. Erna Yuliana. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat tahun 1995-2010*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Atmajaya. Yogyakarta.

Himawan, E. 2009. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah tahun 1981 – 2006*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.

Indraguna, Robbi M.A. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asl Daerah dalam upaya Pelaksanaan otonom Daerah di Kabupaten Jember*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember.

Jolianis. 2012. Analisis *Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Economica Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI. Vol. 1, No. 1.

Kenward, Lyold R. 2004. *Survey of Recent Developments*. Bulletin of Indonesian Economic Students 40 (1): 9-35.

Lia, Putu Perdana Sari. 2013. *Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 2, No. 2.

Marifield, John. 2000. *State Government Expenditure Determinants and Tax Revenue Determinants Revisited.* Public Choice, 102: 25-50.

Mayza, Miragustia dan Raja Masbar. 2013. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi Unsyiah, Vol. 3, No. 1.

Muchtolifah. 2010. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi PAD di Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2.

Triani dan Yeni Kuntari. 2010. *Pengaruh variabel makro terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar*. ASET Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 12, No. 1 / Maret 2010 : 87-94.

Paramitha, Pande dan Anak Agung Ketut Ayuningsari. 2014. *Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,Vol. 3, No. 11.

Payne, James and Georgia College. 2012. "*Government Revenue Expenditure Nexus. Evidence from Latin America*."

Prabawa, Agus. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi tingat Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas*. Majalah Ilmiah Ekonomika, Vol. 12, No. 3.

Priyono, Nuwun. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap realisasi pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Untidar, Vol. 1, No. 1.

Reynaldin, Gufron Sunandar. 2017. Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014). Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Riyanto, Agus. (2012). *Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah, Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010*. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol. 12, No. 2, Juli 2012.

Rosmeli. (2010). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2000-2008*. Jurnal Ekonmi, Vol. 12 No. 2 : 57-62.

Rusera Ricko Yunanto. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten tahun 1990-2012*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Santoso, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri*. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 2, No. 1 / Juli 2005 : 9-18.

Shadbegian, J Ronald .1999. *The effect of tax and expenditure limitations on the revenue structure of local government, 1962-87*.

Sitaniapessy, Harry A.P. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD*. Jurnal Economia, Vol. 9, No. 1.

Sunarsih, Uun dan Ahmad Rifai. 2015. *"Effect of Regional Gross Domestic Product by Sector of Revenue Region"*. IJABER, Vol. 13, No. 7.

Susanto, Iwan dan Ghozali Maskie. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk dan Inflasi Terhadap PAD di Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 2.

Wirakusuma, Ida Gde Bagus, Dwa Gede Rastana dan I Nyoman Ariana Guna. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. Majalah Ilmiah Untab. Vol. 13, No. 1.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DATA VARIABEL

TAHUN	OBYEK	PAD	PDRBK	POP	INF	GOV
2012	CILACAP	90370471	18794599	1666192	6.87	1226680481
2013		278890649	19716532	1676098	8.37	2398465360
2014		374023664	20751023	1685631	8.19	2709950456
2015		409845660	21786030	1694726	2.63	2531654117
2016		502074910	22784292	1703390	2.77	2657124480
2012	BANYUMAS	188589671	16340000	1589930	4.73	1816435039
2013		308849434	17310000	1605585	8.5	2392033240
2014		435597689	18120000	1620772	7.09	2660904675
2015		385677609	19050000	1635909	2.52	2674535084
2016		557383333	20020000	1650625	2.42	2893239158
2012	PURBALINGGA	91191270	13650758	870423	4.09	1105416754
2013		122858740	14222935	879880	9.57	1270871420
2014		202593691	14763255	889172	9.08	1478794964
2015		180202572	15414074	898376	1.62	1524808370
2016		251861669	15991385	907507	2.39	1813162137
2012	BANJARNEGARA	63548916	13050000	883710	4.55	1150779899
2013		98975319	14330000	889894	8.35	1453536831
2014		161652538	16010000	896038	7.78	1673744338
2015		135711381	17570000	901826	2.97	1514703372
2016		221048387	19000000	907410	2.87	2017387964
2012	KEBUMEN	79175978	12910000	1171998	4.64	1385663779
2013		131481737	14040000	1176622	10.46	1741502725
2014		242079502	15790000	1180894	7.36	2154579563
2015		173507685	17520000	1184882	2.91	2045629752
2016		291283790	18770000	1188603	2.71	2706941770
2012	PURWOREJO	77073808	14902538	702678	3.66	1118860993
2013		127565801	16247084	705527	7.14	1434782362
2014		200258601	17881796	708006	8.48	1664439267
2015		233934134	19492028	710386	3.45	1669086053
2016		255460268	21003628	712686	2.66	1967709634
2012	WONOSOBO	55401343	14256000	765113	3.84	1001909769
2013		108729508	15277000	769396	8.82	1300661597
2014		175319365	16812000	773391	8.44	1574354427
2015		145151252	18216700	777122	2.71	1544984911
2016		177947569	19682100	780793	2.97	1216159387
2012	MAGELANG	95290105	13180800	1209486	2.59	1375098039
2013		173253652	13930000	1221673	8.34	1744374754
2014		242448677	14478000	1233701	7.91	2084774335
2015		200653763	15076900	1245496	3.6	2032872262

2016		288485678	16760000	1257123	2.86	2073797409
2012	BOYOLALI	108796100	17980000	945511	3.45	1240694960
2013		160752450	19748000	951809	8.21	1547703844
2014		227516496	22047000	957913	7.45	1792170694
2015		221873999	24303000	963690	2.58	1860250120
2016		292310032	26750000	969325	2.65	2086513803
2012	KLATEN	75875326	16700000	1143676	3.65	1468235321
2013		115441420	17620000	1149002	7.92	1900177322
2014		177923444	18560000	1154028	7.76	2185618603
2015		156097966	19470000	1158795	2.57	2086459358
2016		224197408	20390000	1163218	2.31	2282330771
2012	SUKOHARJO	124642660	21790000	841773	4.22	1115449876
2013		192971720	22840000	849392	8.42	1499991023
2014		264814414	23870000	856861	7.93	1778529385
2015		235933524	25010000	864207	2.69	1785620794
2016		363163428	26210000	871397	2.34	1879860885
2012	WONOGIRI	75187258	15560000	938704	3.43	1348233770
2013		111592606	16240000	942430	8.6	1641357828
2014		182149063	17030000	945682	7.2	1891792645
2015		174557497	17890000	949017	2.13	1950391139
2016		218604854	18750000	951975	2.94	2132909652
2012	KARANGANYAR	89499158	21900000	831891	3.29	1172482484
2013		161715928	22920000	840199	8.7	1545069017
2014		215298860	23890000	848326	7.38	1878127418
2015		181061011	24860000	856198	2.4	1695634199
2016		250472357	25960000	864021	1.93	2313306894
2012	SRAGEN	89875454	20620000	868090	3.74	1230754715
2013		146721552	21910000	871991	7.55	1661915140
2014		254392450	23040000	875615	8.51	1985175886
2015		195290956	24330000	879027	3.05	1793546862
2016		297176332	25660000	882090	2.49	2116629412
2012	GROBOGAN	84755391	11457705	1328183	4.48	1279930528
2013		143586364	12441910	1336317	7.88	1690832188
2014		235295347	13528302	1343985	8.03	1877093463
2015		208438724	14933887	1351429	3.31	1934005085
2016		299211316	16002100	1358404	2.41	2331312039
2012	BLORA	61400000	13266060	840193	3.55	1223983408
2013		94917900	13904971	844325	7.94	1443685270
2014		144724170	14446015	848387	7.13	1637166492
2015		130000000	15151903	852108	2.85	1727738333
2016		183649909	18632511	855573	2.14	1964188841
2012	REMBANG	89947696	15370179	603573	4.28	1011295095
2013		126808084	16062904	608891	6.88	1232988105
2014		179642188	16746175	614065	7.59	1496654626
2015		182191199	17522699	619173	2.66	1534535519
2016		234168365	18763960	624096	1.75	1734304081

2012	PATI	131187727	17543899	1210001	3.92	1494985855
2013		169127416	18334135	1217930	7.57	1911582721
2014		279254884	19067478	1225603	8.01	2189494031
2015		243577485	20083192	1232889	3.23	2072784084
2016		321970325	21760890	1239989	2.31	2590156393
2012	KUDUS	113622250	71760000	800403	4.77	1212217358
2013		144995092	73920000	810893	8.31	1485465908
2014		234073380	76240000	821109	8.59	1934884873
2015		244741959	78240000	831303	3.28	1856616762
2016		291805510	80220000	841499	2.32	2139509750
2012	JEPARA	103713877	13054447	1135628	4.52	1248184403
2013		133778155	13546739	1153321	7.95	1494043919
2014		231673060	13986099	1170785	9.87	1740163429
2015		193119187	14474901	1188289	4.57	1751447136
2016		322509752	14980208	1205800	3.45	2157976237
2012	DEMAK	78032015	11845959	1082498	4.1	1179784499
2013		138214446	12333748	1094495	8.22	1510149145
2014		220329949	12726726	1106209	8.69	1799198399
2015		206843460	13340880	1117905	2.8	1654231698
2016		287457500	13871630	1129298	2.27	2065356316
2012	SEMARANG	129934492	25306396	960497	4.56	1111123240
2013		215679554	26442587	974115	8.11	1499337468
2014		248213020	27606516	987597	8.63	1681541886
2015		238219647	28744181	1000887	2.85	1632541723
2016		318536000	29862393	1014198	2.39	1974199000
2012	TEMANGGUNG	66428523	14821527	724688	4.73	945615162
2013		102080198	15437791	731927	7.01	1113284529
2014		160726945	16061561	738881	7.81	1372335673
2015		152160724	16741855	745825	2.74	1506620232
2016		281328148	17423307	752486	2.42	1833246496
2012	KENDAL	87150664	22938357	918798	3.89	1177808583
2013		136029703	24154445	926791	6.9	1529669295
2014		215294087	25161731	934627	8.34	1788407581
2015		171179320	26288878	942283	4.13	1700696392
2016		263274261	27545095	949682	2.47	1681658043
2012	BATANG	56175216	14514965	722596	3.83	926456900
2013		143502571	15220439	729591	8.08	1219159796
2014		172638217	15896055	736497	7.66	1357910654
2015		149106696	16587600	743090	2.94	1335329214
2016		209957559	17253762	749720	2.24	1560785414
2012	PEKALONGAN	86764834	13289913	854396	2.96	1051258584
2013		148496886	13975677	861125	8.18	1144259327
2014		255037017	14556129	867701	8.32	1546716072
2015		238975251	15142764	873986	3.42	1614021597
2016		310572581	15813916	880092	2.96	1252970018
2012	PEMALANG	77349379	10700000	1274606	4.04	1267467331

2013		136362282	11756000	1279581	6.52	1687584290
2014		217345440	13047000	1284171	7.38	1886225889
2015		190241690	14357000	1288577	3.52	1895458849
2016		275458054	15509800	1292609	2.33	2163136735
2012	TEGAL	89974465	13313000	1409424	4.13	1299550425
2013		156244860	14687000	1414983	7.79	1669274719
2014		253716603	16278000	1420106	8.48	1994456014
2015		255732920	17953000	1424891	3.64	2136841443
2016		316051189	19409000	1429386	2.67	2422128524
2012	BREBES	160496104	14056000	1756018	4.61	1755035210
2013		135055401	15556700	1764982	9.83	2051185346
2014		267772513	17422000	1773373	6.2	2425062659
2015		262781937	19345000	1781379	3.08	2422986706
2016		339156063	20879000	1788880	2.84	2946269402
2012	KOTMAGELANG	63085389	37551651	119416	6.05	575811064
2013		107739839	39665762	119879	7.79	747083068
2014		164927631	43568807	120438	7.92	845558260
2015		131399601	43441130	120792	2.7	781867908
2016		220315949	45566781	121112	2.25	871186563
2012	KOTASURAKARTA	189736947	47851639	505401	2.87	1223960128
2013		298400847	50595502	507798	8.32	1591633335
2014		335660207	53019457	510105	8.01	1692022711
2015		341533937	55663901	512226	2.56	1589045771
2016		452502779	58391332	514171	2.15	1680456921
2012	KOTASALATIGA	63280944	41445000	175989	4.12	573882186
2013		106100451	44745000	178719	7.67	739237604
2014		165747645	48967000	181304	7.84	924980506
2015		167010555	52867000	183815	2.61	811389283
2016		203768652	56617000	186420	2.19	919667517
2012	KOTASEMARANG	786563411	61707236	1616494	0.41	2213614078
2013		925919311	66152204	1644374	8.19	3432028297
2014		1138346451	72988609	1672994	8.53	4078734286
2015		1052736041	78890738	1701114	2.56	3654580506
2016		1337270289	84417319	1729083	2.32	2749339403
2012	KOTAPEKALONGAN	91205776	19945000	288001	3.55	563919275
2013		114252439	21998700	290903	7.4	769993249
2014		144075424	24512000	293718	7.82	852946108
2015		152044594	26245000	296404	3.46	867807179
2016		178602865	28435000	299222	2.94	869324083
2012	KOTATEGAL	117210496	34490000	242714	0.4	630526750
2013		176377335	37460221	243901	5.8	801356298
2014		241936168	41065676	244978	7.4	945569657
2015		229575381	44632875	246119	3.95	968519382
2016		287342170	48082843	247212	2.71	1074739580

Keterangan

PAD : Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)

PDRBK : PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)

POP : Jumlah Penduduk (Jiwa)

INF : Inflasi (Persen)

GOV : Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)

LAMPIRAN II

Hasil Estimasi *Common Effect Models*

Dependent Variable: PAD?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/14/17 Time: 16:05
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.18E+08	27639845	-7.877387	0.0000
PDRBK?	4.986555	0.491609	10.14334	0.0000
POP?	12.12530	29.92718	0.405160	0.6859
GOV?	0.192162	0.020716	9.275820	0.0000
INF?	-3358930.	2681975.	-1.252409	0.2121

R-squared	0.731050	Mean dependent var	2.19E+08
Adjusted R-squared	0.724722	S.D. dependent var	1.71E+08
S.E. of regression	89705397	Akaike info criterion	39.49012
Sum squared resid	1.37E+18	Schwarz criterion	39.58054
Log likelihood	-3450.385	Hannan-Quinn criter.	39.52679
F-statistic	115.5222	Durbin-Watson stat	0.366441
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN III

Hasil Estimasi *Fixed Effect Models*

Dependent Variable: PAD?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/14/17 Time: 16:07
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.35E+09	2.90E+08	-8.095588	0.0000
PDRBK?	8.869943	1.402867	6.322724	0.0000
POP?	2286.204	327.6186	6.978247	0.0000
GOV?	0.091815	0.011337	8.098447	0.0000
INF?	1965731.	1067323.	1.841740	0.0677
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	-1.58E+09			
_BANYUMAS--C	-1.38E+09			
_PURBALINGGA--C	2.14E+08			
_BANJARNEGARA--C	1.44E+08			
_KEBUMEN--C	-5.00E+08			
_PURWOREJO--C	5.99E+08			
_WONOSOBO--C	4.34E+08			
_MAGELANG--C	-5.80E+08			
_BOYOLALI--C	1155100.			
_KLATEN--C	-4.93E+08			
_SUKOHARJO--C	2.58E+08			
_WONOGIRI--C	15928568			
_KARANGANYAR--C	2.12E+08			
_SRAGEN--C	1.70E+08			
_GROBOGAN--C	-8.25E+08			
_BLORA--C	2.45E+08			
_REMBANG--C	8.22E+08			
_PATI--C	-5.91E+08			
_KUDUS--C	-1.64E+08			
_JEPARA--C	-4.19E+08			
_DEMAK--C	-2.66E+08			
_SEMARANG--C	-76585670			
_TEMANGGUNG--C	5.38E+08			
_KENDAL--C	10862383			
_BATANG--C	5.46E+08			
_PEKALONGAN--C	3.15E+08			
_PEMALANG--C	-6.94E+08			
_TEGAL--C	-1.01E+09			
_BREBES--C	-1.85E+09			
_KOTAMAGELANG--C	1.76E+09			
_KOTASURAKARTA--C	8.86E+08			

_KOTASALATIGA--C	1.56E+09
_KOTASEMARANG--C	-1.38E+09
_KOTAPEKALONGAN--C	1.52E+09
_KOTATEGAL--C	1.55E+09

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.972130	Mean dependent var	2.19E+08
Adjusted R-squared	0.964342	S.D. dependent var	1.71E+08
S.E. of regression	32285590	Akaike info criterion	37.61172
Sum squared resid	1.42E+17	Schwarz criterion	38.31702
Log likelihood	-3252.026	Hannan-Quinn criter.	37.89781
F-statistic	124.8356	Durbin-Watson stat	2.456818
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN IV

Hasil Estimasi *Random Effect Models*

Dependent Variable: PAD?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/14/17 Time: 16:09
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.43E+08	42060772	-8.148997	0.0000
PDRBK?	8.312004	0.746307	11.13751	0.0000
POP?	118.4044	37.24980	3.178660	0.0018
GOV?	0.150517	0.009066	16.60149	0.0000
INF?	-1241350.	998446.2	-1.243281	0.2155
Random Effects (Cross)				
_CILACAP--C	-36915285			
_BANYUMAS--C	6733549.			
_PURBALINGGA--C	71930037			
_BANJARNEGARA--C	11067771			
_KEBUMEN--C	-38757531			
_PURWOREJO--C	56981803			
_WONOSOBO--C	48917801			
_MAGELANG--C	636435.0			
_BOYOLALI--C	-3183374.			
_KLATEN--C	-87989152			
_SUKOHARJO--C	41016062			
_WONOGIRI--C	-21999147			
_KARANGANYAR--C	-28978023			
_SRAGEN--C	-14113053			
_GROBOGAN--C	-3476062.			
_BLORA--C	4898281.			
_REMBANG--C	84217221			
_PATI--C	-35671630			
_KUDUS--C	-4.20E+08			
_JEPARA--C	38333048			
_DEMAK--C	49156824			
_SEMARANG--C	-4444496.			
_TEMANGGUNG--C	73949581			
_KENDAL--C	-32636069			
_BATANG--C	80633865			
_PEKALONGAN--C	1.30E+08			
_PEMALANG--C	-577628.3			
_TEGAL--C	-25913741			
_BREBES--C	-1.18E+08			
_KOTAMAGELANG--C	8553778.			

_KOTASURAKARTA--C	-61661057
_KOTASALATIGA--C	-55841335
_KOTASEMARANG--C	1.04E+08
_KOTAPEKALONGAN--C	1.27E+08
_KOTATEGAL--C	52489785

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	80519064	0.8615
Idiosyncratic random	32285590	0.1385

Weighted Statistics			
R-squared	0.777187	Mean dependent var	38614850
Adjusted R-squared	0.771944	S.D. dependent var	80804741
S.E. of regression	38588478	Sum squared resid	2.53E+17
F-statistic	148.2426	Durbin-Watson stat	1.693116
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.650815	Mean dependent var	2.19E+08
Sum squared resid	1.78E+18	Durbin-Watson stat	0.241312

LAMPIRAN V

Hasil Uji F / Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	34.600213	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	396.718603	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PAD?
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/17 Time: 16:08
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.18E+08	27639845	-7.877387	0.0000
PDRBK?	4.986555	0.491609	10.14334	0.0000
POP?	12.12530	29.92718	0.405160	0.6859
GOV?	0.192162	0.020716	9.275820	0.0000
INF?	-3358930.	2681975.	-1.252409	0.2121

R-squared	0.731050	Mean dependent var	2.19E+08
Adjusted R-squared	0.724722	S.D. dependent var	1.71E+08
S.E. of regression	89705397	Akaike info criterion	39.49012
Sum squared resid	1.37E+18	Schwarz criterion	39.58054
Log likelihood	-3450.385	Hannan-Quinn criter.	39.52679
F-statistic	115.5222	Durbin-Watson stat	0.366441
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN VI

Hasil Uji *Haussman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	76.854843	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRBK?	8.869943	8.312004	1.411063	0.6386
POP?	2286.203640	118.404430	105946.400943	0.0000
GOV?	0.091815	0.150517	0.000046	0.0000
INF?	1965730.913288	1241349.611784	-14228314449.75194	0.0000

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: PAD?
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/17 Time: 16:09
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.35E+09	2.90E+08	-8.095588	0.0000
PDRBK?	8.869943	1.402867	6.322724	0.0000
POP?	2286.204	327.6186	6.978247	0.0000
GOV?	0.091815	0.011337	8.098447	0.0000
INF?	1965731.	1067323.	1.841740	0.0677

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.972130	Mean dependent var	2.19E+08
Adjusted R-squared	0.964342	S.D. dependent var	1.71E+08
S.E. of regression	32285590	Akaike info criterion	37.61172
Sum squared resid	1.42E+17	Schwarz criterion	38.31702

Log likelihood	-3252.026	Hannan-Quinn criter.	37.89781
F-statistic	124.8356	Durbin-Watson stat	2.456818
Prob(F-statistic)	0.000000		